



**POLITIK PENGUATAN INSTITUSI
PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA** (Telaah
Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN Di Era Menteri
Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Disertasi

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Doktor dalam Ilmu Pendidikan Islam
Konsentrasi Pendidikan Agama Islam

Oleh
DARUL ABROR
NIM 1592024

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ISLAM RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**



PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARUL ABROR
Tempat/Tanggal Lahir : OKU Timur, 28 April 1986
NIM : 1592023
Pekerjaan : Dosen STAI As-Shiddiqiyah OKI
Alamat : Jl. Lintas Timur 123 Desa Lubuk Seberuk Kecamatan
Lempuing Jaya Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera
Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa, disertasi yang berjudul “**Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia** (Telaah Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A.Wahid Hasyim)” adalah benar karya penulis sendiri dan bukan merupakan jiplakan, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Jika terbukti tidak benar, maka sepenuhnya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Demikian surat pernyataan keaslian ini penulis buat dengan sesungguhnya.

Palembang, Maret 2019
Yang Membuat Pernyataan,



DARUL ABROR
NIM. 1592023



PENGESAHAN REKTOR

Disertasi berjudul: **POLITIK Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia** (Telaah Historis Transformasi FA-UIN Ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Ditulis oleh : Darul Abror
NIM : 1592023

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar
Doktor dalam Ilmu Pendidikan Islam

Palembang, Maret 2019

Rektor,

Prof. Drs. H. M. Sirozi, MA, Ph.D
NIP. 19610306 198903 1 008

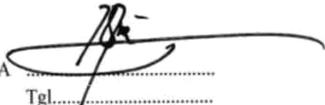
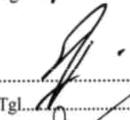
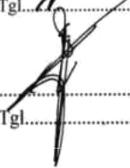
**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH PRA TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul: **POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM ERA MENTERI AGAMA K.H. A. WAHID HASYIM** (Telaah Historis Transformasi FA-UIN Ke PTAIN Di Indonesia Tahun 1949-1952)

Ditulis oleh : Darul Abror
NIM : 1592023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diujikan dalam munaqasyah tertutup pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. Promotor	: Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA NIP. 19520601 198503 1 002	Tgl..... 
2. Promotor	: Dr. Musnur Hery, M.Ag. NIP. 19671028 1993031 001	Tgl..... 
3. Penguji	: Dr. Ismail Sukardi, M.Ag NIP. 196911271996030 1 002	Tgl..... 

Ketua,



Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP. 19630413 199304 1 003

Palembang, Oktober 2018
Sekretaris,



Dr. Akmal Hawi, M.Ag
NIP. 19610730198803 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TERTUTUP**

Disertasi yang berjudul: **POLITIK Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia** (Telaah Historis Transformasi FA-UIN Ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Ditulis oleh : **Darul Abror**
NIM : 1592023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Telah dikoreksi dengan seksama dan dapat disetujui untuk diujikan dalam Munaqasyah Terbuka pada Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.

TIM PENGUJI

1. Promotor : Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA
NIP. 195206011985031002

Tgl. 16-01-2019

2. Promotor : Dr. Musnur Hery, M.Ag.
NIP. 196710281993031001

Tgl. 16-01-2019

3. Penguji : Prof. Dr. H. M. Sirozi, P.hd.
NIP. 196108061989031008

Tgl. 16-01-2019

4. Penguji : Dr. Ismail Sukardi, M.Ag
NIP. 1969112719960301002

Tgl. 25-01-2019

4. Penguji : Prof. Dr. Izzomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001

Tgl. 22-01-2019

Ketua,



Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag
NIP. 19630413 1993041003

Palembang, Januari 2019
Sekretaris,



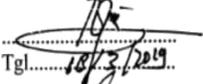
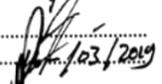
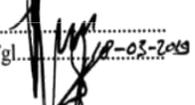
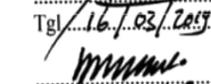
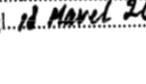
Dr. Akmal Hawi, M.Ag
NIP. 196107301988031002



**DEWAN PENGUJI
PROMOSI DOKTOR**

Disertasi berjudul: **POLITIK Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia** (Telaah Historis Transformasi FA-UIN Ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim)

Ditulis oleh : **Darul Abror**
NIM : 1592023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Ketua | : Dr. Abdurrahmansyah, M.Ag.
NIP. 197307131998031003 | 
Tgl. 16/3/2019 |
| 2. Sekretaris | : Dr. Akmal Hawi, M.Ag.
NIP. 196107301988031002 | 
Tgl. 18-03-2019 |
| 3. Promotor/
(Anggota Penguji) | : Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA
NIP. 195206011985031002 | 
Tgl. 18/3/2019 |
| 4. Promotor/
(Anggota Penguji) | : Dr. Musnur Hery, M.Ag.
NIP. 196710281993031001 | 
Tgl. 16/03/2019 |
| 5. Penguji | : Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.D.
NIP. 196108061989031008 | 
Tgl. 18-03-2019 |
| 6. Penguji | : Dr. Ismail Sukardi, M.Ag.
NIP. 1969112719960301002 | 
Tgl. |
| 7. Penguji | : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A.
NIP. 196206201988031001 | 
Tgl. 16/03/2019 |
| 8. Penguji | : Prof. Waspodo, Ph.D.
NIP. 194012191965091001 | 
Tgl. 18 Maret 2019 |

NOTA DINAS

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul :

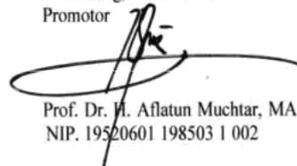
**POLITIK Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di
Indonesia** (Studi Kasus Transformasi FA-UII Ke PTAIN
Era Menteri Agama K.H. Abdul Wahid Hasyim)

Ditulis oleh : Darul Abror
NIM : 1592023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam Ujian Pendahuluan (Pra-Tertutup).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018
Promotor



Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA
NIP. 19520601 198503 1 002

NOTA DINAS

Kepada yth.
Direktur Program Pascasarjana
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Fatah Palembang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, koreksi dan penilaian terhadap naskah disertasi berjudul:

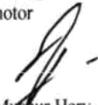
**POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
DI INDONESIA (Studi Kasus Transformasi FA-UII Ke PTAIN
Era Menteri Agama K.H. Abdul Wahid Hasyim)**

Ditulis oleh : **Darul Abror**
NIM : 1592023
Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang untuk diujikan dalam Ujian Pendahuluan (Pra-Tertutup).

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2018
Promotor


Dr. Mashur Hery, M.Ag
NIP. 19671028 1993031 001

ABSTRAK

Berdasarkan hasil perolehan dokumen dan wawancara, terdapat dua konstruk temuan dalam proses politik penguatan institusi pendidikan Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim, Temuan *Pertama*, munculnya program penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah adanya “*Praksis Motif Imbang*” pada personal Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim yang relevan dengan kondisi sosio-politik yang kompleks di era tersebut. Pada karakteristik personalnya memiliki kecenderungan konsep pendidikan tinggi Islam yang nasionalis, modern dan moderat dengan mensintesis ilmu pengetahuan (logika) dengan taqwa (wahyu). Sedangkan pada praksisnya memiliki multi motif intrinsik yang kuat, baik atas perhatiannya yang *all out* terhadap kemajuan pendidikan Islam, spirit praksis politik yang tinggi, luasnya pengetahuan dan kuatnya manifestasi jiwa nasionalisme. Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim juga piawai dalam berorganisasi, memiliki kecenderungan paradigma pendidikan alternatif sintetik serta cakap dan dapat diterima oleh semua golongan. Sedangkan pada kondisi sosio-politiknya, terdapat sekulerisasi ilmu pengetahuan antara “umum dan agama” atas kuatnya ideologi golongan “sekuler” yang telah terbentuk kokoh sampai ingin membubarkan Kementerian Agama di era K.H. A. Wahid Hasyim. Selain itu adanya respon atas lemahnya “*political will*” Rezim terhadap permasalahan pendidikan Islam dikarenakan rezim lebih fokus perhatiannya terhadap perkembangan Universitas “umum”.

Temuan *kedua*, konstruk pola interaksi yang digunakan era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam proses penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia adalah pola interaksi “*Asosiatif-Akomodatif yang Kompromistis*”, yakni proses interaksi yang memiliki indikasi menyatukan ide, gagasan yang aplikatif dengan golongan sekuler agar mendapat perhatian dan identitas yang “imbang”, sehingga *bergaining* program dengan Rezim (yang lebih mengharapkan penerangan UII di bawah Kementerian Pendidikan dan Budaya) dilakukan dengan cara yang lebih adaptif, koalisi kebangsaan antar Kementerian Agama, serta memprioritaskan stabilitas dan kepentingan semua golongan dengan sikap yang kompromistis, *tassammuh* dan *tawassuth* untuk mengurangi pertentangan “sekuler dan agamis” dengan tujuan men dapatkan solusi alternatif yakni “transformasi FA-UII ke PTAIN” sebagai embrio peradaban modern dan moderat yang dikontrol dan dikembangkan mandiri di bawah Kementerian Agama. Dengan dua konstruksi temuan di atas, peneliti bermaksud mengkonstruksi temuan-temuan di atas menjadi suatu konsep baru, yakni konsep politik “*ikat rotan*” sebagai bentuk representasi kecakapan personal dan kemahiran interaksi Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim yang bisa dijadikan formula baru di era kontemporer dalam memberikan sumbangsih terhadap kemajuan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Kata Kunci: Politik, Pendidikan Tinggi Islam, K.H.A. Wahid Hasyim.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that arose the strengthening of Islamic higher education institutions in Indonesia as well as patterns of socio-political interaction in the era of the Minister of Religion K.H.A. Wahid Hasyim in strengthening Islamic higher education institutions in Indonesia on the transformation of the Faculty of Religion UII to PTAIN which has never been studied by anyone. So that this research adds scientific treasure to the focus of the study of educational politics that has not been so familiar in Indonesia, for this reason this study is important to study. This study uses "Interest Groups Theory" which has been incorporated in The Politics of Education Association (PEA) as an analysis knife so that it is relevant to the context of the discussion. The method in this study uses the qualitative method "Library Reseach" with an educational political approach with a historical style. Whereas in collecting data obtained do study documentation and interview. The data analysis technique used in this study is a circular qualitative analysis technique by describing, classifying and combining.. Based on the results of document acquisition and interviews, there are two findings in the political process of strengthening Islamic education institutions in Indonesia in the era of the Minister of Religion K.H. A. Wahid Hasyim, First Findings, the emergence of a program to strengthen Islamic higher education institutions in Indonesia is the existence of a "balanced motive praxis" on the person of the Minister of Religion of K.H. A. Wahid Hasyim which is relevant to the complex socio-political conditions in that era. On his personal characteristics, Minister of Religion K.H.A. Wahid Hasyim has a strong multi intrinsic motive, both for his all out attention to the advancement of Islamic education, having a high political praxis spirit, the breadth of knowledge and the strong manifestation of the spirit of nationalism. Minister of Religion K.H.A. Wahid Hasyim is also good at organizing, has a tendency towards alternative education paradigms and is capable and can be accepted by all groups. Of course "competent and sufficient" competencies are important in the succession of the praxis of higher education institution programs at the Ministry of Religion in its era. Whereas in its socio-political conditions, there is secularization of knowledge "between the public and religion" for the strong ideology of the "secular" group that has been formed firmly to want to dissolve the Ministry of Religion in the era of K.H. A. Wahid Hasyim. In addition, there is a response to the weakness of "political will" regime to the problem of Islamic education because the regime focuses more on the development of "general" universities.

The second finding, according to the construct of the interaction pattern used in the era of the Minister of Religion K.H. A. Wahid Hasyim in the process of strengthening Islamic higher education institutions in Indonesia is an interaction pattern of "Compromising Accommodative Associative", namely the interaction process that has a unified and or balanced indication with secular groups, even training programs with the Regime (which is more hopeful for UII below) Ministry of Education and Culture in a more adaptive way, national coalition between the Ministry of Religion, and prioritizing stability and interests of all groups with compromise, tassammuh and tawassuth to reduce "secular and religious" conflicts with the aim of obtaining alternative solutions "FA-UII transformation to PTAIN "and the most urgent is the implementation of the KHA Ministry of Religion's political program Wahid Hasyim to change the educational paradigm from modern colonialist to nationalist and controlled under the Ministry of Religion. Of course personal skills and interaction skills of Minister of Religion K.H.A. Wahid Hasyim can be used as a new formula in the contemporary era in contributing to the advancement of Islamic higher education in Indonesia.

Keywords: Politics, Islamic Higher Education, K.H.A. Wahid Hasyim.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB KE LATIN

Untuk memudahkan dalam penulisan lambing bunyi huruf, dari bahasa Arab ke Latin, maka acuan penulisan transliterasi Arab ke Latin bagi mahasiswa pada Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 pada 22 Januari 1987.

A. Konsonan Tunggal

No	Nama	Huruf Latin	Keterangan	Huruf Arab
1.	ا	Alif	Tdk dilambang	Tdk dilambang
2.	ب	Ba	B	be
3.	ت	Ta'	T	Te
4.	ث	sa'	š	Es (dengan titik di atas)
5.	ج	Jim	J	Je
6.	ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
8.	د	Dal	D	De
9.	ذ	Zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
10.	ر	ra'	R	Er
11.	ز	Zai	Z	Zet
12.	س	Sin	S	Es
13.	ش	Syin	Sy	Es dan Ye
14.	ص	Shad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
15.	ض	Dhad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
16.	ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	'	Koma di atas
19.	غ	Gayn	G	Ge
20.	ف	Fa'	F	Ef
21.	ق	Qaf	Q	Qi
22.	ك	Kaf	K	Ka
23.	ل	Lam	L	El
24.	م	Mim	M	Em
25.	ن	Nun	N	En
26.	و	w	w	We
27.	ه	h	h	Ha
28.	ء	'	Apostrof	Apostrof
29.	ي	y	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

ة دء	Ditulis	'iddah
------	---------	--------

C. Ta' Marbutah

Apabila mati maka ditulis h

تهبه	Ditulis	hibah
تهيزج	ditulis	jizyah

Ada pengecualian terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasas Indonesia, seperti kata sholat, zakat. Akan tetapi bila diikuti oleh kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

عابله و لا اتمار	Ditulis	Kar āmah al-auliyā'
------------------	---------	---------------------

Bila ta' marbutah hidup atau dengan harokat, *fathah*, *kasrah* dan *dammah* maka ditulis t.

رطفاة اكر	Ditulis	Zak āt al-fitri
-----------	---------	-----------------

D. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-----	<i>Fathah</i>	a	a
-----	<i>Kasroh</i>	i	i
-----	<i>d ammah</i>	u	u

E. Vokal Panjang

Nama	Tulisan Arab	Tulisan latin
Fathah + alif + ya	تهيله اء	<i>J āhiliyyah</i>
Fathah + alif layyinah	هه عسهه	<i>Yas' ā</i>
Kasrah + ya' mati	هه ىرء	<i>Karim</i>
D ammah + wawu mati	هه ورفه ض	<i>Furud</i>

F. Vokal Rangkap

Tanda Huruf	Nama	Gabungan	Nama	Contoh
هه.....هه	<i>Fathah dan ya' mati</i>	<i>ai</i> <i>au</i>	a dan i (ai)	هه كنههه
هه.....هه	<i>Fathah dan wawu mati</i>		a dan u (au)	هه لوهه

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

ههتهههه	ditulis	<i>a'antum</i>
ههتهههه	ditulis	<i>u'iddat</i>
ههتهههههههههههه	ditulis	<i>la, in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>'As-sama</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-syams</i>
ذو الفروض	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>
اهل الندوة	ditulis	<i>Ahl an-nadwah</i>

KATA PENGANTAR

ÉOŠÉİmİ§□9§\$# Ç\$Ç≈UHU+q=§□9§\$# \$«!«\$# \$ÉOÉóıóıōİ

Rasa syukur tak terhingga peneliti panjatkan pada Allah SWT pemilik segala ilmu dan hidayah, sehingga peneliti dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul:

POLITIK PENGUATAN INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ISLAM DI INDONESIA (*Telaah Historis Transformasi FA-UII Ke PTAIN Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim*) dengan segenap kemampuan dan kreatifitas peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian disertasi ini sehingga bisa menambah khazanah ilmiah yang belum familier di Indonesia, untuk itu ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada pihak-pihak terkait dan teristimewa kepada :

⁵ Prof. Dr. H. M. Sirozi, Ph.d, selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang sekaligus responden dan penguji yang telah memberikan masukan konstruktif dan profesional dalam penguatan fokus kajian ini;

⁶ Prof. Dr. H. Duski Ibrahim, M.Ag, selaku direktur Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang sekaligus ketua sidang dalam ujian disertasi peneliti yang selalu memberikan motivasi dan pelayanan akademik yang bijak terhadap seluruh mahasiswa pascasarjana khususnya bagi peneliti;

⁷ Prof. Dr. H. Aflatun Muchtar, MA, selaku promotor dan Bapak Dr. Musnur Hery, M.Ag, selaku co. promotor yang selalu memberikan motivasi dan masukan guna menjadi cendekiawan muslim yang kompetitif;

⁸ Prof. Waspodo, Ph.D., Prof. Dr. H. Izomiddin, MA., dan Dr. Ismail Sukardi, M.Ag, selaku penguji yang memang relevan kompetensi dan fokus kajian penelitiannya dengan peneliti, serta Dr. H. Akmal Hawi, M.Ag, selaku Ketua Prodi PAI sekaligus sekretaris penguji yang selalu memberikan motivasi dan solusi alternatif pada proses penelitian ini;

⁹ K.H. Dr. Salahuddin Wahid (putra K.H. A. Wahid Hasyim) selaku responden primer di Jombang, Responden dari Kementerian Agama RI Jakarta dan Responden dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Peneliti juga ucapkan terimakasih atas bantuan pelacakan dokumen oleh pengelola Perpustakaan Jakarta, perpustakaan Litbang Kemenag RI Jakarta, perpustakaan pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perpustakaan PBNU Jakarta, perpustakaan pusat dan pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, perpustakaan UII Yogyakarta serta perpustakaan private dan umum Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang;

¹⁰ Bapak dan Ibu di Sukaraja dan Lempuing Jaya, lebih khusus kepada *al-Marhūmah* Ibunda Siti Zumarotin yang memberikan do'a restu, kasih sayang dan ridlonya guna penyelesaian karya ini;

¹¹ Istriku tercinta “Zuhairina Izzatul Lailiya, Ss”, s osok wanita *sholehah* yang selalu memberi motivasi *all out*, kesetiaan dan kasih sayangnya guna penyelesaian disertasi ini;

⁷ Kedua putraku Muhammad Zadittaqwa al-Abrory dan Abdullah Faqih al-Abrory dan adik-adikku sebagai penghibur dan penyejuk hati dalam penyelesaian karya ini;

⁸ Seluruh pendidik dan tenaga kependidikan, serta sahabat-sahabatku seperjuangan “*Mora Scholarship 5000 Doctor*” di Program Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang, sekaligus seluruh insan akademis, rekan, keluarga, dan sahabat yang berpartisipasi dalam suksesi penelitian ini.

Semoga karya ini menambah khazanah ilmiah yang positif di Indonesia, baik bagi pembaca dan khususnya bagi peneliti sendiri untuk lebih berbenah. Tiada Kesempurnaan dalam kehidupan, melainkan fokus dan upaya maksimal untuk lebih baik tentunya menjadi suatu keharusan. “Setia p kesulitan pasti ada kemudahan” .

Palembang, Maret 2019
Peneliti;

Darul Abror
NIM. 1592023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii	
PENGESAHAN REKTOR	iii	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI PRA-TERTUTUP		iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TERTUTUP	v	
DEWAN PENGUJI PROMOSI DOKTOR		vi
PENGESAHAN PROMOTOR		vii
ABSTRAK		xi
PEDOMAN TRANSLITERASI		xiii
KATA PENGANTAR		xvi
DAFTAR ISI		xviii
DAFTAR TABEL		xxi
DAFTAR GAMBAR		xxii
DAFTAR LAMPIRAN		xxiv

Bab I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1	
B. Rumusan Masalah		24
C. Batasan Masalah		25
D. Tujuan Penelitian		25
E. Kegunaan Penelitian		25
F. Tinjauan Pustaka	26	
G. Metode Penelitian	3	7
H. Sistematika Pembahasan		61

BAB II LANDASAN TEORI

A. Politik Pendidikan dan Pendidikan Islam		63
1. Pengertian Politik Pendidikan Islam		63
2. Relasi Politik dan Pendidikan Islam		74
3. Pendekatan dan Asumsi Dasar Kajian Politik Pendidikan Islam...		78
4. Tujuan dan Manfaat Kajian Politik Pendidikan Islam		96
5. Ruang Lingkup Kajian Politik Pendidikan Islam		103
a) Distingsi Fokus kajian		103
b) Fokus Kajian Politik Pendidikan Islam		111
6. Potret Metodologis Kajian Politik Pendidikan Islam		117
B. Teori <i>Interest Group</i>	123	
C. Transformasi Pendidikan Islam		132
1. Pengertian Transformasi Pendidikan Islam		133
2. Munculnya Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia		138
D. Akar Sejarah Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia		142

**BAB III MUNCULNYA PROGRAM POLITIK PENGUATAN
INSTITUSI PTI DI INDONESIA ERA MENTERI AGAMA K.H. A.
WAHID HASYIM**

A. Faktor Personal Menteri Agama	164
1. Memiliki Trah Karebet	165
2. Kuatnya Motif Intrinsik	174
a. Perhatian <i>All Out</i> terhadap Pendidikan	176
b. Tingginya Spirit Praksis Politik	18
c. Luasnya Pengetahuan	186
d. Kuatnya Jiwa Nasionalisme	196
3. Piawai dalam Berorganisasi	202
4. Kecenderungan Paradigma Pendidikan Alternatif	213
5. Cakap dan Dapat Diterima oleh Semua Golongan	227
B. Faktor Sosio-Politik	235
1. Faktor Sosiologis	236
a. Respon atas Berdirinya UGM	236
b. Lemahnya Logika Golongan Mayoritas	243
c. Kegelisahan Sosial “Matrikulasi Alumni Madrasah”	252
d. Pengaruh Kentalnya Kultur dan Ideologi Pesantren	255
e. Kecenderungan Menjauhnya Golongan Sekuler dari Syari’at	266
2. Pengaruh Partisipasi Rezim	273
a. Reaksi Alternatif Rezim Soekarno-Hatta	275
b. Penguatan Regulasi PP. 34 Tahun 1950.....	286
3. Faktor Politik	293
a. <i>Follow up</i> Program Konstruktif Menteri Agama RIS	295
b. Menguatnya Reaksi Menuju “Sintesa Pengetahuan”	304
c. Keterlibatan Masyumi yang Aspiratif	316
d. Kementerian Agama yang Konsolidatif.....	320
e. Waktu yang Relatif Lama	330
f. Pengaruhnya di Kalangan “ <i>Elite</i> ” dan “ <i>Groups</i> ”	336
C. Pengaruh dan Keterlibatan Tokoh	344
1. K.H. Hasyim Asy’ari yang Responsif	344
2. K.H. Fakih Usman yang Kooperatif	351
3. K.H. Maskur yang Bijak	356

**BAB IV POLA INTERAKSI SOSIO-POLITIK ERA MENTERI
AGAMA K.H. A. WAHID HASYIM**

A. Pola Interaksi era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim	361
B. Pola Interaksi Assosiatif Kooperatif	371
1. <i>Bergaining</i> Program	374
2. Kooptasi atas Berdirinya PTAIN	379
3. Koalisi dengan Menteri Agama RI K.H. Fakih Usman	382
a. Penyamaan Persepsi	386
b. Interaksi Kebangsaan	389
4. Pembentukan Opini Publik	391
a. Hubungannya dengan Media Massa	393
b. Spirit Pidato yang Diplomatis	399
c. Ceramah Komunikatif-Konstruktif	400
C. Pola Interaksi Assosiatif Akomodatif	411
1. Akomodatif Kompromistis	415
a. Lobi dan Kompromi Lintas Sektor	415
b. Kompromi Kelompok Mayoritas	422
2. Akomodatif nan Toleran	431
a. Spirit “ <i>Tasamuh</i> ” Golongan Mayoritas	432
b. Konsolidasi Istiqomah “Para Katuranggan”	439
D. Pola Interaksi Disasosiatif Kompetitif	442
1. Refleksi Kepentingan Unifikatif Ala Santri	444
2. Penegasan Pola Kooperatif Legitimatif	450

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	460
B. Implikasi Penelitian	462
C. Saran dan Rekomendasi	467
Daftar Pustaka	470

Lampiran-lampiran

A. Karya-karya K.H. A. Wahid Hasyim	489
B. Kebijakan-Kebijakan Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim	494
C. Cuplikan syair-syair	497
D. Biografi Peneliti	498
E. Dokumentasi Penelitian	502
F. Instrumen Penelitian	519
G. Buku Bimbingan	523
H. Surat Keterangan Promotor	527
I. Surat Penelitian	528
J. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950	535
K. Power Point	536

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbedaan asumsi dasar kajian.....	...	83
Tabel 2	Pengalaman Organisasi K.H. A. Wahid Hasyim		207
Tabel 3	Kementerian Era K.H. A. Wahid Hasyim		294
Tabel 4	Jabatan Kementerian era K.H.A. Wahid Hasyim		342

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Konsep Korelasi ilmu pengetahuan dengan taqwa.....	11
Gambar 2	Analisis kualitatif sebagai proses melingkar	59
Gambar 3	Pasca Wawancara dengan Prof. Drs. M. Sirozi, PhD. (Pakar Politik Pendidikan Indonesia)	84
Gambar 4	Deskripsi kekuasaan menurut Ibnu Khaldun antara (Idealitas dan Realitas)	87
Gambar 5	Perbedaan konsepsi ilmu pengetahuan “Islam dan sekuler ..	90
Gambar 6	Manfaat kajian politik pendidikan	102
Gambar 7	Tujuan dan tugas pendidikan politik	109
Gambar 8	Teori <i>Interest Group</i>	123
Gambar 9	Pelacakan dokumen di Wahid Hasyim Private Library.....	159
Gambar 10	Kantor UII pada Tahun 1949/1950.....	162
Gambar 11	Trah Keraton K.H. A. Wahid Hasyim	168
Gambar 12	Silsilah K.H. A. Wahid Hasyim	172
Gambar 13.	Kecenderungan Paradigma Pendidikan Wahid Hasyim	217
Gambar 14	Susunan Kementerian Agama RIS	301
Gambar 15	Kondisi sosio-politik era Menteri Agama Wahid Hasyim.....	326
Gambar 16	Pasca Wawancara dengan K.H. Salahuddin Wahid	331
Gambar 17	Dokumentasi Menteri Agama RIS dan RI Pasca Konferensi ...	353
Gambar 18.	Pola Interaksi Sosio-Politik K.H. A. Wahid Hasyim	370
Gambar 19	Sambutan Menteri Agama Wahid Hasyim.....	381

Gambar 20	Pidato Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim.....	400
Gambar 21	Regulasi tentang PTAIN	451

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Karya-Karya K.H. A. Wahid Hasyim	489
Lampiran 2. Kebijakan-Kebijakan Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim..	494
Lampiran 3. Cuplikan Syair-Syair	497
Lampiran 4. Biografi Penulis.....	498
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	502
Lampiran 6. Instrumen Penelitian.....	519
Lampiran 7. Buku Bimbingan	523
Lampiran 8. Surat Keterangan Promotor	527
Lampiran 9. Surat Penelitian di Pondok Pesantren Tebu Ireng	528
Lampiran 10. Surat Penelitian di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	529
Lampiran 11. Surat Penelitian di UII Yogyakarta	530
Lampiran 12. Surat Penelitian di Perpusnas Jakarta	531
Lampiran 13. Surat Penelitian di Perpus PBNU Jakarta	532
Lampiran 14. Surat Penelitian di Balitbang dan Diklat Kemenag RI	533
Lampiran 15. Surat Keterangan dari UIN Suna Kalijaga Yogyakarta.....	534
Lampiran 16. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950.....	535

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan Islam di Indonesia era Orde Lama mengalami suatu proses politik dan pendidikan dengan kompleksitas dinamika yang berimplikasi positif maupun negatif, khususnya adanya agenda politik diskriminasi pendidikan oleh penjajah yang signifikan. Hal ini tentu dapat dipahami secara kompleks dengan multi faktornya dalam tinjauan fakta-fakta historis. Sehingga perkembangan pendidikan Islam bisa dikatakan terhambat, yang berimbang dengan pendidikan “pesantren” yang tampil sebagai bagian penting di era kemerdekaan. Tingginya masyarakat yang beragama Islam yang didukung secara struktural tokoh-tokoh Islam “ pesantren” berperan penting dalam mendesain dan memformulasi prospektif pendidikan Islam di Indonesia. Setiap masa pasti ada orangnya, dan setiap orang pasti punya masanya, setidaknya kalimat itu tepat dijadikan suatu narasi bahwa masing-

masing Menteri Agama¹ dalam realitas sejarah memiliki distingsi signifikan pada misi, visi, corak, identitas, proses, kebijakan dan paradigma serta *effect* terhadap perkembangan peradaban pendidikan Islam di Indonesia.

¹ Lihat penegasan Azumardi Azra dan Saiful Umam dalam menegaskan identitas dan karakteristik menteri-menteri agama di Indonesia, H. M. Rasjidi, BA sebagai menteri agama pertama di Indonesia sebagai menteri agama yang revolutif dengan kompleksnya polemik keagamaan dari teoritis sampai praktisnya, kemudian Prof. K.H. Fathurrahman Kafrawi dengan pengajaran agama di sekolah umum, K.H. Ali Masjkur dengan kementerian agama yang gerilya dan waliyul amri, sampai pada Wahid Hasyim sebagai menteri agama yang konsolidatif dan penuh pembelaan eksistensi kementerian agama atas tingginya kepentingan kelompok non kooperatif. Lihat Azra dan Umam, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI, 1998), hlm. 1-113.

Di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim memang memiliki realitas sejarah yang jauh dijangkau oleh kaum atau masyarakat awam pada umumnya. Permasalahan yang mendasar di eranya adalah pada masa penjajahan Belanda yang memperkuat basis kolonialisasi sosial, politik maupun ideologisnya. Salah satu peninggalan sejarah yang paling bernilai negatif adalah peninggalan “Dikotomi ilmu pengetahuan” antara pengetahuan Islam dengan pengetahuan umum. Praksis dikotomi ilmu pengetahuan di Indonesia sengaja didesain oleh kelompok “Barat” untuk memperkuat basis ideologis yang berkesinambungan sehingga memiliki implikasi negatif terhadap persatuan bangsa, dengan harapan adanya sekulerisasi sosio-ideologis melalui jalur “pendidikan”, khususnya pada institusi pendidikan Islam di Indonesia, sehingga keberpihakan “Barat” lebih kental dan berpengaruh secara kontinyu.

Hal di atas dapat dilihat dari politik penjajah Belanda pada waktu itu, usaha yang dilakukan penjajah dengan dua hal, yakni kedalam dan keluar, kedalam dengan cara menghalangi pikiran-pikiran modern dalam Islam dengan mempertahankan yang kolot-kolot, kemudian yang keluar dengan mengenalkan dunia terpelajar akan gambaran jelek pada Islam, sehingga enggan untuk ke Islam, dengan kata lain penjajahan tidak hanya dengan cara lahiriyah, melainkan dengan batiniyah, maka penjajahan kebudayaan adalah yang paling penting, hal ini sesuai dengan yang diutarakan oleh ahli pikir

penjajah, C. Snouck Hurgronje,² dengan tegas bahwa “*memasukkan pendidikan barat pada rakyat, nanti dengan sendirinya ia akan menjauhi pendidikannya yang dulu, artinya pendidikan Islam, “makin lama makin jauh dengan Islam”*”.³ Implikasi dari proses ini tentunya menjadi tantangan besar bagi Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim untuk berpikir dan bertindak maksimal dalam penguatan sistem pendidikan yang nondikotomik dan berkebangsaan di Indonesia.

Sesuai historis di atas, terdapat empat point dasar bagi peneliti dengan mencoba merenung dan *deep analysis* latar historis yang perlu dijelaskan dalam sudut pandang yang lebih signifikan, yakni fokus pada penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Maka setidaknya peristiwa di bawah ini yang melatar belakangi kondisi sosio-politik pada penelitian ini, khususnya atas implikasi negatif kolonialisasi di Indonesia.

² Snouck Hurgronje (1857-1936) adalah nama yang tak asing bagi banyak orang Indonesia yang belajar islamologi dan sejarah. Sebagai seorang orientalis, kepakarannya dalam studi Islam memang sangat diakui. Berasal dari keluarga Protestan taat, ia memulai karier akademik dengan belajar teologi di Universitas Leiden pada 1874 dan lulus sebagai doktor di kampus yang sama pada 1880 dengan disertasinya yang terkenal: *Het Mekkaansche Feest* (Perayaan Mekkah). Dalam narasi sejarah Indonesia, ia banyak dikonstruksikan sebagai “aktor jahat” di balik takluknya Aceh oleh pemerintah kolonial dalam perang yang berlangsung dari 1878 hingga 1908. Ia juga dianggap sebagai pembelah sekaligus pelemah Islam Indonesia. Lihat https://tirto.id/siasat-snouck-hurgronje-menjinakkan-islam-politik-cMYw?gclid=Cj0KCQiAmuHhBRD0ARIsAFWypWjlk2XyZY3hgNW2Qi2_e4XiE4c3E0fWsYpG7tsgKY_B5-lgHTRA0GMaAu7PEALw_wcB. Diakses pada 12 Januari 2019. Sebagai penasihat penjajah Hindia-Belanda mengenai agama-agama Islam, Snouck memiliki banyak catatan-catatan penting mengenai Islam dan umatnya, termasuk pergerakan-pergerakan nasional yang dilakukan oleh ulama pesantren melawan penjajah. Bahkan, Snouck pernah diutus oleh Hindia-Belanda untuk memata-matai aktivitas para ulama dan guru besar asal Nusantara yang sedang mengajar di tanah Hijaz (Makkah dan Madinah). Ia berperan layaknya agen intelijen. Interaksinya dengan umat Islam membuahakan catatan-catatan penting sebagai bahan informasi penting untuk Hindia-Belanda. Lihat juga <http://www.nu.or.id/post/read/95995/snouck-hurgronje-dan-sebutan-santri>. Diakses pada 12 Januari 2019.

³ Atjeh, H. Aboebakar., *Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”, (Jombang: Pustaka Tebu Ireng, 2015), hlm. 930-931.

Pertama, Adanya spirit yang tinggi dari golongan sekuler dalam proses penguatan paradigma dan kemajuan bangsa yang lebih dikotomik⁴ atau yang lebih tepat dengan bahasa sekuler⁵ model Barat yang belum relevan paradigmanya dengan identitas kebangsaan Indonesia, khususnya bagi kelompok nasionalis agamis. Dimana golongan nasionalis sekuler telah mapan dengan cara pandangnya yang didukung oleh keberpihakan sistem pemerintahan saat itu.

Hal inilah yang dikhawatirkan oleh para tokoh-tokoh Islam sebelumnya. Para Kyai sebelumnya memang mengkhawatirkan pendidikan model Eropa yang lebih menekankan pengembangan rasionalitas ilmu pengetahuan dan sikap duniawi yang dinilai dapat melunturkan budi luhur bangsa Indonesia, sehingga mereka memperkuat terlebih dahulu tradisi pendidikan pesantren dalam rangka menjaga budi luhur bangsa.⁶ Dengan demikian, akan pentingnya kemajuan suatu bangsa yang tetap didampingi dengan akhlak *mahmudah*, mulia dan berbudi pekerti yang baik sebagai tujuan substatifnya. Jika demikian, tentunya rencana strategis juga harus tepat dan sesuai dengan tujuan tersebut dengan melakukan konsolidasi konstruktif secara personal dan struktural yang dilandaskan pada spirit keagamaan yang tinggi.

⁴ Pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. <https://kbbi.web.id/dikotomi>. Diakses pada 10 Januari 2019.

¹² Bersifat duniawi atau kebendaan (bukan bersifat keagamaan atau kerohanian. Lihat <https://kbbi.web.id/sekuler>. Diakses pada 10 Januari 2019.

¹³ Dhofier, Zamakhsyari, "Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia" Ibid., hlm. 168.

Bahkan yang lebih mendapat sorotan tajam dari peneliti dalam kajian ini adalah adanya implikasi negatif yang ideologis dari golongan yang mengiginkan Kementerian Agama di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim agar dihapuskan dengan menggabungkan urusan pendidikan pada kementerian pendidikan dan kebudayaan saja. Kementerian Agama yang di era tersebut memang masih mendapat serangan tajam dari kelompok sekuler untuk membubarkan Kementerian Agama.⁷ Tokoh yang menggugat adalah Rasuna Said dan Sirajjudin Abbas, Cs yang menghendaki dibubarkannya Departemen Agama dan Departemen Penerangan dengan alasan bahwa kedua departemen ini tidak efisien, dan lebih merupakan ajang rebutan partai-partai tertentu saja jika departemen itu dikuasai oleh partai tertentu saja (Masyumi–

⁹ Tentunya Persoalan ini didorong atas fakta sejarah sebelumnya yang awal mulanya timbul dalam rapat PPKI pada tahun 1944 yang disampaikan oleh Latuharhary, seorang Kristen yang berasal dari Maluku, mengusulkan kepada rapat agar masalah agama ditangani oleh kementerian pendidikan. Ia berpendapat bahwa *“suatu kementerian khusus tentang agama akan menimbulkan kecemburuan pihak lain apabila salah satu agama saja yang mendominasi padahal di Indonesia ada lima agama yang harus diperhatikan hak-haknya, apabila menteri agamanya Islam, tentu agama lain akan merasa tidak seang, begitu sebaliknya, umat Islam tidak akan senang bila yang memimpin kementerian ini dari agama lain. dia menambahkan agar paitia tersebut tidak menimbulkan perpecahan serta berkurangnya satu kementerian berarti penghematan biaya Negara.”* Hal ini juga didukung Mulim dari Lampung, Abdul Abbas *“agar masalah-masalah agama ditangani oleh kementerian pendidikan dengan mengusulkan nama kementerian pendidikan, pengajaran dan agama”*. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menyarankan *“agar masalah agama ditangani oleh kementerian dalam negeri”*. Iwa Kusuma Sumantri dengan nada sinis juga mendukung Latuharhary, *“dalam tiga tahun terakhir ini terlalu banyak perhatian dicurahkan pada masalah-masalah Islam”*. Dari 27 peserta hanya 6 orang yang setuju dengan didirikan kementerian agama, sehingga hal ini menjadi kekecewaan baru bagi umat Islam yang mayoritas. Akan tetapi pada kabinet Sjahrir pada tahun tanggal 12 Maret 1946 berhasil mendirikan Kementerian Agama dengan mengangkat H. Rasjidi sebagai Menteri Agamanya. Dan kemudian, persoalan ini muncul kembali di era menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim pada tahun 1950. Lihat Mastuki, HS. (1997). *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 1945-1975. (Sejarah dan Perannya)*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah. Hal. 137-140.

NU) yang pada waktu itu dikuasai oleh Partai PNI.⁸ Peristiwa ini di terjadi di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim, tentunya menjadi tugas berat bagi Kementerian Agama era tersebut untuk membendung gerakan-gerakan sekuler yang memiliki “sanad ideologis” jelas dari Belanda yang sudah mulai jauh dari jiwa nasionalisme.

Kedua, perhatian Rezim yang lebih fokus pada “UGM dan UI (tinggalan Belanda). Tentunya hal ini atas kuatnya pengaruh golongan sekuler yang partisipatif atas praksis kebijakan rezim. Sehingga kekuatan kelompok sosialis dan sekuler seperti sultan syahrir dan Amir Saifudin yang lebih mendominasi.⁹ Kedekatan Rezim dengan salah satu tokoh penting adalah Sutan Sjahrir¹⁰ yang menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia sekaligus merangkap Menteri dalam Negeri dan

⁸ Maka kemudian Azra memberikan ketegasan bahwa era Wahid Hasyim adalah era konsolidasi dan pembelaan eksistensi kementerian agama. Lihat Puslitbang Kehidupan Beragama dan Penelitian dan Pengembangan Agama. (1980/1981). *Ibid*. Hal. 47-48.

⁹ Suryanegara, Ahmad Mansur. (2016). *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santri dalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid kedua*. *Ibid*. 299.

¹⁰ Sutan Syahrir adalah salah satu bapak perintis berdirinya Republik Indonesia dan merupakan perdana menteri pertama Indonesia. Sutan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ayahnya bernama Mohammad Rasad gelar Maharaja Soetan bin Soetan Leman gelar Soetan Palindih dan ibunya bernama Puti Siti Rabiah yang berasal dari Koto Gadang, Agam, Sumatera Barat. Orang tua Sutan Syahrir merupakan orang yang terpandang di Sumatera. Ayahnya menjabat sebagai penasihat Sultan Deli dan juga kepala jaksa atau *landraad* pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Karena lahir di keluarga yang kondisi ekonominya berkecukupan, Sutan Syahrir masuk di sekolah terbaik pada zaman kolonial Belanda ketika itu. Ia memulai pendidikannya di ELS (*Europeesche Lagere School*) atau setingkat sekolah dasar. Setelah menyelesaikan pendidikan di ELS, ia kemudian masuk di MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*) yang setingkat dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Disini ia kemudian banyak membaca buku-buku asing terbitan eropa dan juga karya-karya sastra dari luar. Tamat dari MULO pada tahun 1926, ia kemudian pindah ke Bandung dan bersekolah di AMS (*Algemeene Middelbare School*) yang merupakan sekolah termahal dan terbaik di Bandung. Di AMS, ia menjadi siswa terbaik disana, Sutan Syahrir banyak menghabiskan waktunya dengan membaca buku-buku terbitan Eropa dan juga mengikuti klub kesenian di sekolahnya. Lihat <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/sutan-syahrir-si-kancil-dan-partai-sosialis-indonesia/>. Diakses pada 10 Januari 2019.

Menteri luar Negeri pada waktu yang sama.¹¹ Maka dengan sistem parlemen¹² tersebut memungkinkan Rezim Soekarno memiliki kecenderungan lebih kepada kelompok nasionalis “sek uler”, salah satunya fokus perhatiannya lebih terhadap pendidikan UGM dan UI (tinggalan belanda) daripada institusi pendidikan Islam atau Pesantren.

Ketiga, Adanya kebutuhan mendesak bagi umat Islam atas lemahnya logika dan banyaknya alumni madrasah dan pesantren yang belum terakomodir pada pendidikan tinggi umum maupun UII sendiri. Abudin Nata telah menegaskan bahwa dua alasan yang mendasari terbentuknya perguruan tinggi Islam (PTI) adalah *pertama*; adanya kebutuhan umat Islam dengan kondisi banyaknya alumni yang sudah menyelesaikan di sekolah atau madrasah di pesantren. *Kedua*, semakin besarnya peranan lulusan universitas sekuler model Barat di tengah masyarakat Indonesia dengan sendirinya menantang umat Islam untuk berpikir menyediakan sistem pendidikan tinggi bagi generasi mudanya.¹³ Hal ini juga didukung oleh Nor Huda bahwa kasus adanya peraturan di Universitas Islam Indonesia (UII) tentang tolak ukur baku yang dikehendaki bagi pendidikan matrikulasi yang memiliki arti kursus

¹¹ Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Sutan_Syahrir. Diakses pada 10 Januari 2019.

¹² Merupakan sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensiil, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri, yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensiil, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintahan, namun dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara saja.

¹³ Lihat Nata, Abudin., “ *Sejarah pertumbuhan dan perkembangan lembaga-lembaga pendidikan Islam di Indonesia*” Grasindo. Jakarta. 2001. Hal.231-233. Lihat juga Khursid Ahmad, *The Nature of the Islamic Resurgence*” dalam John. L. Esposito (ed)., *Voices Of resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983). Hlm.218-219.

persiapan bagi para murid madrasah harus ditutup.¹⁴ Permasalahan mendasar di atas tidak bisa dianggap remeh dalam aspek politik, sosial, pendidikan dan ideologi bangsa Indonesia. Sehingga implikasi dari praksis “Sekulerisme” di atas tentunya menjadi tantangan besar era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim untuk berpikir dan bertindak maksimal dalam penguatan sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi Islam yang nondikotomik dan berkebangsaan di Indonesia. Walaupun dengan tantangan di atas, K.H. A. Wahid Hasyim memiliki keinginan yang kuat agar para santri tidak lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat daripada kaum barat.¹⁵

Keempat, adanya implikasi negatif sekaligus tantangan atas peristiwa Konferensi meja Bundar (KMB)¹⁶ Internasional di *Den Haag* Belanda tahun 1949 yang menjadikan Indonesia dengan dua perdana menteri, yakni pertama, Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Perdana menterinya

¹⁴ Lihat Huda, Nor. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 330.

¹⁵ Atjeh, H. Aboebakar., *Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”,Ibid, hlm. 171.

¹⁶ Walaupun KMB memberikan bentuk kemerdekaan yang utuh, akan tetapi implikasi negative dala perkembangan pendidika islam di Idonesia satt itu. Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO (*Bijeenkomst voor Federaal Overleg*), yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung tiga pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948), dan Perjanjian Roem-Royen (1949). Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Perundingan menghasilkan sejumlah dokumen, di antaranya Piagam Kedaulatan, Statuta Persatuan, kesepakatan ekonomi serta kesepakatan terkait urusan sosial dan militer. Mereka juga menyepakati penarikan mundur tentara Belanda "dalam waktu sesingkat-singkatnya", serta Republik Indonesia Serikat (RIS) memberikan status *bangsa paling disukai* kepada Belanda. Selain itu, tidak akan ada diskriminasi terhadap warga negara dan perusahaan Belanda, serta Republik bersedia mengambil alih kesepakatan dagang yang sebelumnya dirundingkan oleh Hindia Belanda. Akan tetapi, ada perdebatan dalam hal utang pemerintah

kolonial Belanda dan status Papua Barat. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar. Di akses pada 8 Agustus 2017.

Muhammad Hatta dengan Menteri Agamanya Wahid Hasyim, dan yang kedua, Republik Indonesia (RI) dengan Perdana Menteri A. Halim dengan Menteri Agamanya Faqih Usman. Sehingga sangat berdampak secara politis internal bangsa Indonesia dan memperlambat perkembangan dalam bidang pendidikan Islam, sehingga butuh proses yang serius dan perhatian yang *all out* dalam mengukuhkan kembali persatuan Republik Indonesia dalam segala bidang, khususnya relasinya antara politik dengan pendidikan Islam.

Menurut Wahid, dualisme kementerian dengan dua perdana menteri memang menjadi hambatan tersendiri, untuk itu Menteri Agama Wahid Hasyim berupaya ada satu kesatuan kementerian agama dengan melakukan konsolidasi efektif dengan Hatta selaku perdana menteri RIS dan A. Halim selaku perdana menteri RI untuk membentuk Negara Kesatuan.¹⁷ Sehingga Deliar Noer menegaskan bahwa *“percaturan politik di Indonesia pada tahun 1950-an, salah satu faktor utamanya adalah bukan lagi pada faktor keamanan “kemerdekaan” dan lainnya, melainkan n sejauhmana kedekatan para pemimpin partai politik dengan presiden, tentara dan dengan para pemimpin partai lain’*.¹⁸ Untuk itu penting menjadi perhatian Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dengan latar historis dengan

¹⁷ Dua Perdana Menteri tersebut disatukan pada tanggal 19 Mei 1950 sehingga menghasilkan kesepakatan yang ditanda tangani oleh Wahid Hasyim dan Faqih Usman melalui surat Keputusan No. A II/2/2175 tanggal 7 Juni 1950 dengan menyatukan dua kementerian dan melebur menjadi satu. Azra dan Umam “ *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*”, (Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI, 1998), hlm. 83.

¹⁸ Di era ini memang merupakan perkembangan percaturan politik baik dalam menegakkan dan menjatuhkan kabinet, usaha-usaha menyusun, membentuk serta mengakhiri masa jabatannya, khususnya dalam partai Islam, karena Soekarno tampil dalam percaturan tersebut yang tentunya dari “PNI”. Lihat Noer, Deli ar., “ *Partai Islam di Pentasi Nasional 1945-1965*” (Jakarta. PT. Pustaka Utama Grafiti. 1987). hal.197.

demikian kompleksnya. Realitas peristiwa di atas mempersulit bagi golongan Nasionalis “Agamis” dalam memperkuat basis internal di Kementerian Agama dalam penguatan pendidikan Islam di Indonesia, ditambah dengan beberapa permasalahan eksternal secara sosio-politik, antara golongan, tentu bukan hal yang mudah. Dengan realitas peristiwa demikian, di eranya, Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim memiliki cita-cita besar agar pendidikan Islam di Indonesia tumbuh dan berkembang dan kuat dalam praksisnya dengan nilai-nilai pendidikan yang nondikotomi “sekuler” antara ilmu agama dan umum, dengan harapan bisa melengkapi masa depan bangsa Indonesia dengan modernitas yang tetap menjaga unsur-unsur ke-Islaman dan budaya “Nasional”, sehingga beliau menginginkan pendidikan tinggi Islam dengan mendirikan Universitas Islam¹⁹ yang nondikotomi beserta lengkap dengan perpustakaan di Indonesia. Hal ini terlihat dalam pidatonya ketika meresmikan PTAIN di Yogyakarta yang juga tertulis di media cetak saat itu.

Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim menyampaikan *Bagi golongan Islam Sekolah Agama yang yang mengajarkan dan memelihara pendidikan agama dengan dasar pengetahuan betul-betul bernilai Universitas belumlah ada di Indonesia, sedang bagi golongan yang lain sudah ada Sekolah Tinggi teologi yang dapat dibanggakan dan membuahkan cerdas pandai bagi*

¹⁹ Satu dari Sembilan rencana usaha dan program politik menteri Agama RIS Wahid Hasyim tepatnya pada nomor urut tujuh adalah “ *Persiapan-persiapan buat meletakkan dasar pembentukan Universitas Islam dengan Perpustakaan*”. Lihat Atjeh, H. Aboebakar., “*Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”, Ibid, hlm. 691. Lihat juga Yusuf dkk. (2017). *Kaleidoskop Kementerian Agama Republik Indonesia 1946-2016, Jejak Langkah dari Masalah*. Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Balitbang dan Diklat Kementerian Agama. hal. 67.

*kepentingan masyarakat dan Negara.*²⁰ Tentunya hal ini salah satu bentuk ekspektasinya terhadap eksistensi Kementerian Agama untuk memiliki Universitas Islam sendiri, dan setidaknya PTAIN lah yang memungkinkan di era tersebut untuk menjadi cangkok dan modal utama untuk mengukuhkan menjadi Universitas pada masa berikutnya. Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim berpendapat bahwa dalam pandangan Islam, “ *ilmu pengetahuan tidaklah dianggap sebagai satu syarat hidup yang dapat berdiri sendiri. Disamping pengetahuan, diletakkan syarat lain, yaitu taqwa, dua syarat hidup tadi, ilmu pengetahuan dan taqwa, dalam pandangan*

Islam tidak mungkin dijauhkan dan harus sama-sama cukup lengkap”.²¹

Yang seirama dengan Einstein.²² Adapun konsepsi korelasi ilmu pengetahuan dan taqwa K.H. A. Wahid Hasyim dapat dilihat di bawah ini;



Gambar 1. Konsep korelasi ilmu pengetahuan dan taqwa²³

²⁰ Lihat Hasyim, Wahid., 2011. “*Mengapa saya Memilih Nahdlatul Ulama*”, Bandung. PT. Mizan Pustaka. hal.141-142.

²¹ Azra dan Umam dalam H. Aboebakar Atjeh., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI, 1998), hlm. 81.

²² Menurut Albert Einstein “*Ilmu tanpa agama buta, agama tanpa ilmu lumpuh*” lihat <https://www.kompasiana.com/dediekusmayadi/55005a9c813311d019fa7727/ilmu-tanpa-agama-buta-agama-tanpa-ilmu-lumpuh>. Diakses pada 10 Januari 2019.

²³ Dalam pandangan Islam Taqwa dan pengetahuan tidak mungkin dijauhkan, dan harus sama-sama cukup lengkap, bahkan Islam memandang lebih condong pada taqwa. Ilmu Ilmu sebagai buah otak haruslah diimbangi dengan taqwa sebagai isi hati. Lihat Hasyim, A. Wahid., 2011. “*Mengapa saya Memilih Nahdlatul Ulama*”, Bandung. PT. Mizan Pustaka. hal.13-8-139. Pengetahuan merupakan konsepsi atas dasar keluasan pengetahuan dan kecerdasan otodidaknya dengan tetap menjaga nilai-nilai kepesantrenannya

Konsepsi proporsionalitas ilmu pengetahuan Menteri Agama Wahid Hasyim menjadi pola kompleks yang memang telah digagas dan diaplikasikan sejak "*Tulabul 'ilmi*" dengan menjunjung nilai-nilai kepesantrenannya yakni "*akhlaq al-karimah*" dengan tetap menjadikan logika ataupun rasionalitas tetap utama, sampai-sampai menegaskan jika tanpa logika maka manusia itu tidak beragama, serta mengedepankan independensi ilmu pengetahuan dari politik, sehingga benar-benar di atas dari kepentingan, melainkan kemaslahatan secara syari'at. Selain itu juga bagaimana ilmu tersebut juga mampu didasarkan atas refleksi nilai-nilai taqwa dengan kompleksitas proses pada ilmu pengetahuan, sehingga empat faktor tersebut bagi Menteri Agama Wahid Hasyim benar-benar tidak dapat dipisahkan sebagai bentuk proporsionalitas ilmu pengetahuan, tentunya hal ini yang masih relevan diaplikasikan dalam konteks zaman era milenial ini.

Salah satu contoh keutamaan akhlaq bagi Wahid Hasyim adalah walaupun memiliki kecerdasan mumpuni dalam bahasa, dengan multi kompetensi bahasa yang dimiliki, baik bahasa Belanda, Inggris, Jepang, Jerman dan Bahasa Arab, ketika di ajak berbahasa Arab dengan ayahandanya K.H. Hasyim Asy'ari, Wahid Hasyim tetap menjawab dengan bahasa penuh identitas kulturnya, yakni bahasa jawa halus. Tentunya konsepsi akhlaq yang masih tetap menjadi aspek penting dalam refleksi pengetahuan yang dimiliki

yang identik dengan kultur dan akhlaq kepada seseorang yang lebih di anggap lebih tinggi dipesantren dengan tetap meneguhkan independensinya dari politik dengan tetap berdasar atas logika yang tinggi.

menjadi hal utama dan patut untuk di dijadikan suri tauladan, sehingga dengan kemampuan tersebut menjadi ideologi yang moderat dalam lingkungan kultur pesantren di eranya. Konsepsi relasi ilmu pengetahuan di atas setidaknya juga relevan dengan ayat Al-Qur'an;²⁴

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا
يَفْسَحُ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya “ Hai orang-orang beriman apabila kamu dika takan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Qs. Al-Mujadalah;11)

Munculnya proses penguatan Institusi pendidikan tingginya di era Kementerian Agama K.H. A. Wahid Hasyim berupaya dengan gagasan konstruktifnya dengan tujuan menyeimbangkan ilmu pengetahuan umum dan agama dengan dasar taqwa dalam pandangan Islam yang tidak mungkin dijauhkan dan harus sama-sama cukup lengkap sebagai syarat hidup.²⁵ Tentunya pengaruh tokoh sentral pesantren “K.H. Has yim Asy’ari” dalam hal ini sebagai pembuka jalan kompromi antara Indonesia Jepang, dengan kondisi yang sudah tua, tentunya secara eksplisit rekomendasi terhadap puteranya dalam mengembangkan pola dan proses politik Nasional kepada

²⁴ <http://www.indoquran.web.id/quran/viewAyat/5115>. Diakses pada 10 Januari 2018.

²⁵ Lihat Azra dan Umam yang mengutip dari H. Aboebakar Atjeh,, *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Ibid. hlm. 91.

K.H. Wahid Hasyim yang disebut Harry J. Benda memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap Islam di Indonesia.²⁶

Salah satu bagian keikutsertaan formulasi kebijakan pendidikan era Wahid Hasyim adalah ketika pada tanggal 14 Agustus 1950 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, dalam rangka pengembangan Fakultas agama UII (Universitas Islam Indonesia) menjadi (PTAIN) Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri yang bertujuan memberi pengajaran tinggi dan sebagai salah satu pusat untuk memperkembangkan ilmu pengetahuan tentang agama Islam, serta mempunyai azas membentuk manusia susila dan berbudi luhur.²⁷ Demikian dengan rezim Soekarno saat itu, lebih memilih menguatkan UII ketimbang mendirikan Perguruan Tinggi Islam sendiri, maka kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950 tentang peningkatan status Fakultas Agama UII menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN.²⁸ Tentu hal ini memungkinkan atas kedekatan rezim Soekarno yang dekat dengan

²⁶ Wahid Hasyim di uraikan sebagai pribadi yang mendapat pendidikan baik dalam agama Islam dan sekolah-sekolah Barat, sebagai pemimpin NU dan Masyumi yang mampu menjalin hubungan rapat “erat/rukun” dengan lingkaran Nasionalis, Lihat Benda, Harry J., “*The Crescent and The Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation, 1942-1945*”, terj. (Den Haag: The University Of Rochester, 1957), hal. 313.

²⁷ Atjeh, H. Aboebakar., “*Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”, Ibid, hlm. 692. Lihat juga Azra dan Umam yang mengutip dari H. Aboebakar Atjeh., *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*, Ibid. hlm. 91. Lihat juga peraturan pemerintah No 34 Tahun 1950, yang di tandatangani pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh presiden, dan menteri kehakiman A. G. Pringgodigdo serta Fakih Usman menteri Agama RI di Yogyakarta.

²⁸ <https://tirto.id/sejarah-iii-dan-uin-hingga-hasrat-mewujudkan-iii-cDvs>, di akses pada 19 April 2018. Lihat juga kasus adanya peraturan di UII tentang tolak ukur baku yang dikehendaki bagi pendidikan matrikulasi yang memiliki arti kursus persiapan bagi para murid madrasah harus ditutup. Lihat Huda, Nor. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal.330.

kelompok sosialis seperti apa yang pernah disebutkan oleh K.H. A. Wahid Hasyim tentang sumberdaya pada UII pada saat itu.

Walaupun demikian, penandatanganan pada peraturan pemerintah tersebut di atas masih atas nama menteri Faqih Usman yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Agama RI Yogyakarta sebelum disatukan dengan Menteri Agama RIS, karena kedudukan UII pada waktu itu berada di Yogyakarta yang dua hari kemudian dilantiknya Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama Republik Indonesia (RI) kesatuan. Sehingga dikembangkan sedemikian pesatnya menjadi IAIN (Institut Agama Islam Negeri) sampai pada UIN (Universitas Islam Negeri) sampai sekarang, jadi keseimbangan secara kelembagaan akhirnya terpenuhi, tentunya ini merupakan bagian jasa para pendahulu²⁹ yang tidak bisa di abaikan dalam proses formulasi dan konstruksi kebijakan pendidikan tinggi Islam, sehingga secara konseptual, ada keseimbangan antara pengetahuan agama dan umum yang tetap bersyarat dengan nilai-nilai ketaqwaan kepada Allah SWT. Sampai upaya penyatuan Kementerian agama RIS dan RI tersebut kemudian mendapat satu persetujuan bersama antara Menteri Agama RIS³⁰ Jakarta dengan Menteri Agama RI di Yogyakarta dalam suatu berita putusan sidang kabinet pada

²⁹ Dalam hal ini bukan hanya Menteri Agama Wahid Hasyim saja, melainkan banyak tokoh yang berpengaruh dalam realitas sejarahnya, akan tetapi peneliti lebih fokus kajiannya pada era Menteri Agama Wahid Hasyim dengan tetap menelitik sejauhmana pengaruh dan keterlibatan tokoh lain dalam mendukung dan atau menolak “jika ada” dalam proses transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN.

³⁰ RIS merupakan kementerian agama serikat yang didirikan atas dasar konferensi di *Denharg* Belanda pada tahun 1949, sehingga di Indonesia terbentuk menjadi dua perdana menteri dan dua kementerian agama.

tanggal 12 Juli 1950.³¹ Hal ini tentunya yang menjadikan suatu kekuatan dalam formulasi suatu kebijakan baru yang tentunya memiliki dampak lebih tinggi dan masalah untuk masa yang akan datang. Maka layak jika Azra menegaskan era Wahid Hasyim adalah era yang konsolidatif.

Sesuatu yang menggelitik penulis adalah, bagaimana proses politik penguatan pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim bisa mencapai tujuan kebijakan tersebut dalam multi dinamika sosio politik, baik pada kuatnya ideologi sekuler dengan tekanan untuk membubarkan Kementerian Agama, sekulerisasi pengetahuan, perhatian Rezim lebih fokus pada pendidikan “Nasionalis” ditambah dengan kondisi dualisme kementerian yakni Kementerian Agama RI dan RIS, akan tetapi era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim masih mampu meletakkan dasar peradaban modern melalui pendidikan tinggi Islam di Indonesia melalui PTAIN nya di bawah Kementerian Agama, tentu hal ini menjadi menarik untuk diteliti lebih lanjut.

Bagi Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim tentunya terdapat peluang, tantangan dan hambatan dalam multi aspek, baik sumber daya manusia, sumber anggaran serta kepentingan-kepentingan kekuasaan era rezim Soekarno yang tentunya ada proses kompromi dan akomodir peluang dan kepentingannya sehingga jadi lebih *balance* saat itu. Bagaimana ide itu

³¹ Lihat Peraturan pemerintah No 34 Tahun 1950, yang di tandatangani pada tanggal 14 Agustus 1950 oleh presiden, dan menteri kehakiman A. G. Pringgodigdo serta menteri Agama Fakih Usman yang dua hari kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 Wahid Hasyim diangkat sebagai menteri agama atas dasar surat persetujuan bersama antara menteri agama Republik Indonesia Serikat Jakarta Wahid Hasyim dengan Menteri Agama RI Yogyakarta Fakih Usman, dan kebijakan presiden Soekarno pada waktu itu.

muncul, kekuatan apa yang mempengaruhi, dan kepentingan apa saja yang ada pada rezim saat itu, serta bagaimana pola interaksinya yang dilakukan sampai pada proses penguatan formulasi suatu kebijakan pendidikan tinggi Islam tersebut?, Hal ini yang membuat penulis lebih termotivasi untuk meneliti mengapa ide program penguatan pendidikan Tinggi Islam itu muncul di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dan bagaimana pola interaksinya sehingga mampu menjadikan embrio peradaban modern hingga memberikan nilai “*usefulness*” sampai era kontemporer dan masa depan Indonesia.

Disisilain, upaya restrukturisasi dan eksistensi Kementerian Agama saat itu memang memiliki tantangan yang berat yang belum tentu setiap orang mampu melakukannya. Dalam pidatonya pada konferensi besar antara Kementerian Agama dengan organisasi besar non politik, Menteri Agama Wahid Hasyim menyampaikan “ *ada tiga kelompok masyarakat yang mempunyai persepsi berbeda terhadap keberadaan Kementerian Agama, pertama kelompok sekuler, kedua Umat Islam yang mayoritas jadi penduduk, dan ketiga kelompok minoritas*” .³² Hal inilah yang menjadi penting untuk dituangkan dalam suatu penelitian khususnya model politik pendidikan era Menteri Agama Wahid Hasyim dengan kemampuan politik dan kompleksitas pengetahuannya, khususnya pengetahuan dalam pendidikan tinggi Islam. Belum lagi, jika direlevansikan outputnya di era sekarang, timbul pertanyaan

³² *Pertama* kelompok sekuler ini adalah kelompok yang tidak memiliki semangat keagamaan, *kedua* Umat Islam yang mayoritas jadi penduduk, adalah kelompok yang antusias menyambut kementerian Agama ini sekaligus menyandarkan harapan yang tinggi, dan *ketiga* kelompok minoritas adalah kelompok non Islam. Lihat Azra dan Umam “ *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*”, (Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI, 1998), hlm. 84-85.

baru, sudahkah sampai pada konsepsi awal dari pendahulu, yakni “nilai-nilai taqwa (Akhlak)” sebagai prasyarat hidup itu?, tentu nya hal ini menjadi pertimbangan dan tugas besar oleh praktisi pendidikan Islam hari ini dan masa akan datang. Tentunya, perguruan tinggi agama Islam Negeri didirikan sebagai jawaban atas sumber daya manusia Islam di Indonesia yang masih lemah dan lambat di Indonesia. Sehingga perbedaan falsafah hidup yang digunakan antara Islam Indonesia dengan Islam di negeri lain, salah satu upayanya adalah dengan menempatkan pengetahuan yang tidak boleh dikungkung oleh perasaan keagamaan yang sempit. Dengan demikian, Perguruan Tinggi Islam Negeri ini sebagai media dalam memandang pengetahuan dari sudut logika dan rasionalitas yang tinggi dengan tetap menundukkan politik pada ilmu. ‘Sehingga kemajuan otak tetap disertai dengan kemajuan budipekerti yang baik atau taqwa dan menyebabkan nilai maupun pandangan manusia jadi konsisten, kontinue dan adaptif dari bawah ke atas, dalam arti kemajuan. Karena dari awala upaya formulasi sistem kebijakan pendidikan Islam lebih dengan memutar corak politik keagamaan kolonialis menjadi corak yang nasionalis. Selain itu, juga adanya penyetaraan dan keseimbangan secara demokratis tentang hak beragama, peningkatan moral pembangunan serta penghidupan nilai-nilai ketuhanan yang maha esa dalam bermasyarakat. Hal ini yang tentunya *menjadi pilot project* dalam politik keagamaan dengan tetap menjunjuang heteroginitas keberagaman akidah dan kultur, yang bisa tentu hal ini sebenarnya makna dari bangsa yang

Indonesianis, “tingginya nasionalisme untuk Indone sia yang

rahmatililamin". Pertimbangan selanjutnya adalah karena penelitian dan publikasi ilmiah terhadap kajian politik pendidikan masih terlihat minim di Indonesia. Walaupun sudah berkembang menjadi satu bidang kajian yang banyak diminati di universitas-universitas terkemuka di Eropa, Amerika dan Australia, politik pendidikan belum begitu familiar di kalangan ilmuwan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, baik ilmuwan pendidikan maupun ilmuwan politik.³³ Kajian politik pendidikan masih tertinggal jauh dari bidang-bidang kajian pendidikan lainnya, seperti psikologi pendidikan, sejarah pendidikan dan sosiologi pendidikan.³⁴ Hal ini serupa dengan apa yang disampaikan oleh Jalaludin dalam pengantar buku politik pendidikan M. Sirozi.³⁵ Selain itu, berdasarkan penelusuran indeks online, belum ditemukan disertasi yang mengangkat politik pendidikan Islam khususnya pada pendidikan tinggi Islam di Tanah Air Menteri Agama Wahid Hasyim di Tanah Air melalui analisis data sejarah. Dengan demikian, tentunya kajian yang fokus pada politik pendidikan tinggi Islam ini menjadi layak untuk diketengahkan dalam penelitian ini untuk menambah khazanah khususnya di Tanah Air.

Disisilain, sesuai konteks di atas, menurut penulis pertimbangan yang paling urgent adalah adanya tokoh di eranya yang memiliki karakteristik

³³ Bagaimanapun buku ini akan ikut memperkaya kajian tentang pendidikan, khususnya di Tanah Air. Kajian seperti ini masih terhitung langka. Dalam konteks inilah, setidaknya kehadiran buku ini menjadi penting. M. Sirozi., *"Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan"*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. X.

³⁴ M. Sirozi., *"Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan"*, Ibid. hal. 146-147.

³⁵ M. Sirozi., *"Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan"*, Ibid. hal. VIII.

politik pendidikan Islam yang sangat tepat untuk di bahas pada aspek politik pendidikannya, beliau adalah K. H. Abdul Wahid Hasyim ketika menjabat sebagai menteri agama di Indonesia. Untuk itu, beliau telah lebih memberikan pendidikan kepada bangsa dalam aspek politik pendidikannya, khususnya dalam proses perumusan tujuan-tujuan kebijakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia serta cara dan strateginya dalam menggerakkan perangkat-perangkatnya menuju tujuan tertentu, sehingga layak dan perlu diketengahkan dalam penelitian ini.

Alasan kelayakan penelitian ini, juga atas kecakapan pada karakteristik k.H. A. Wahid Hasyim sendiri yang memiliki identitas, strategi, interaksi dalam perumusan kebijakan pembaharuan pendidikan tinggi Islam yang unik dalam aspek politik pendidikannya, khususnya tentang taktik dan cara-cara pencapaian tujuan pendidikan serta kemampuan menggerakkan perangkat-perangkatnya untuk mencapai tujuan tertentu dalam ikut serta pembaharuan peradaban pendidikan modern di Indonesia. K.H. A. Wahid Hasyim memiliki latar belakang akademik, kultur “ *ndalem*” pesantren dan mengawali pembaharuan pendidikan Islam juga dari pesantren. Salah satu alasan Wahid Hasyim dalam ikut serta kebijakan pembaharuan pendidikan pesantren, selain karena K.H Hasyim Asy’ari juga sekaligus ayahandanya memiliki cita-cita yang lebih tinggi dan maju daripada ulama-ulama lain

semasanya,³⁶ Wahid Hasyim memiliki keinginan yang kuat agar para santri tidak lebih rendah kedudukannya dalam masyarakat daripada kaum barat.³⁷

Kyai Wahid berupaya secepat mungkin dengan melakukan langkah-langkah agar berbagai aspek modernitas yang positif dikuasai oleh umat Islam yang menjadi golongan terbesar bangsa Indonesia. Upaya memadu ilmu pengetahuan modern (termasuk sains dan teknologi) di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) sangat diperlukan agar para lulusannya dapat menjadi ulama yang lengkap pengetahuannya dalam paduan yang serasi dengan memelihara tradisi keilmuan Islam yang dikembangkan oleh para ulama masa lalu. Desain yang dikembangkan oleh Kyai Wahid adalah tradisi modernitas keilmuan perlu dipadukan untuk memenuhi kebutuhan

bangsa Indonesia dalam mengarungi kehidupan modern.³⁸

Saat usianya baru 30 tahun Kyai Wahid, sebagai kepala *shumubu* (Kantor Urusan Agama) Jawa dan Madura yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang, ditunjuk bung Karno sebagai salah seorang anggota BPKI, untuk merumuskan pembukaan UUD'45.³⁹ Wahid Hasyim memiliki model, identitas, karakteristik dan futuris dalam konteks dan asas kebutuhan pendidikan bangsa pada masa itu dan masa depan dalam konteks formulasi

³⁶ Adapun yang menjadi kegelisahan akademik penulis adalah mengapa *effect* dari proses yang dilakukan dalam konteks politik pendidikannya K.H. A. Wahid Hasyim sampai saat ini masih tetap *survive* dan berkembang menjadi acuan pada praksis kebijakan pendidikan tinggi Islam dalam konteks Nasional?, Atjeh, H. Aboebakar., *Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”, (Jombang: Pustaka Tebu Ireng, 2015), hlm. 93.

³⁷ Atjeh, H. Aboebakar., *Sejarah Hidup K.H Abdul Wahid Hasjim*”Ibid., hlm. 171.

³⁸ Dhofier, Zamakhsyari., “*Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*” (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 165.

³⁹ Dhofier, Zamakhsyari “*Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*”, Ibid, hal. 147.

kebijakan pendidikan Islam yang kokoh. K.H. A. Wahid Hasyim adalah salah seorang pemikir, perumus, serta pelaku sejarah Indonesia Modern abad ke-20 yang sangat penting. Buah pikiran dan cita-citanya adalah ramuan antara peradaban melayu nusantara dan peradaban Indonesia modern periode kemerdekaan yang diteruskan oleh generasi berikutnya dengan tetap menjaga tradisi yang baik dan mengambil Sesutu yang sesuai dengan zamannya yang lebih baik. Ini adalah salah satu bukti beliau memang benar-benar layak menyandang gelar kehormatan sesuai dengan perjuangan dan pembaharuannya di bidang pendidikan tinggi Islam khususnya, lebih khusus pada bagaimana beliau menggerakkan perangkat, bagaimana dan serta kemana perangkat tersebut diarahkan dengan segala taktik, cara dan strategi untuk mencapai esensi tujuan pendidikan Islam, yakni Keseimbangan antara pengetahuan agama dan umum serta nilai-nilai taqwa.

Salah satu hal yang membuat menarik lagi adalah, Wahid Hasyim memiliki keunggulan dalam aspek politik pendidikan tentang kemampuan menggerakkan perangkat dalam merumuskan tujuan-tujuan pendidikan Islam, mampu mengakomodir potensi dan kepentingan dalam pembaharuan kebijakan pendidikan Islam. Hal ini terlihat selain aktif dalam pembaharuan sistem pendidikan Islam di pesantren, beliau Wahid Hasyim, kariernya terus menanjak dengan cepat, Presiden Soekarno mengangkat Kyai Wahid menjadi Menteri Agama Republik Indonesia Serikat pada tanggal 29 Desember 1949 yang di eranya ini terdapat proses yang tepat penguatan-penguatan substantis, baik struktural kementerian dan proses politik pendidikan yang ideal dan

penting untuk di kaji, maka sangat sesuai dengan konteks kajian politik pendidikan.⁴⁰

Kajian tentang politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama Wahid Hasyim khususnya dalam aspek politik pendidikannya hampir dilupakan oleh banyak orang, bahkan sepengetahuan penulis, belum mendapat perhatian dikalangan sarjana kontemporer. Padahal dari sisi metodologis, kajian ini memungkinkan untuk dilakukan dengan kebaruan fokus kajiannya “politik pendidikan”. Se suai apa yang disampaikan Dhofier tentang K.H. A. Wahid Hasyim.⁴¹ Oleh karena itu, kajian ini fokus didasarkan atas pendekatan politik pendidikan dengan analisis historis, dan mengedepankan sisi fundamental strategis yang di era menteri agama Wahid Hasyim tersebut.

Atas dasar pertimbangan yang diketengahkan di atas, maka kajian tentang politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama Wahid Hasyim menjadi layak untuk dituangkan dalam disertasi ini, dengan harapan tidak sekedar hanya menganalisis proses interaksi politik

⁴⁰ Maka kajiannya lebih mengarah pada peran negara terhadap pendidikan dalam proses formulasi atau pengembangan suatu program dan kebijakan pendidikan Hal ini tentunya membuktikan secara tidak kebetulan, bahwa di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim memiliki peran yang sangat besar dalam pembaharuan kebijakan pendidikan Islam yang realitasnya sama-sama ikut serta memberikan pembaharuan dalam pendidikan dengan strategi dan model masing-masing, salah satunya adalah dengan strukturalnya Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama termuda yang “*all out*” dengan implikasi sosial yang tidak diragukan lagi, salah satu buktinya dapat dilihat implikasi dari proses formulasi kebijakan pendidikan tinggi Islamnya. M. Sirozi., “*Konteks dan Kerangka Konseptual Kajian Politik Pendidikan,*”, Palembang, Noerfikri. 2013. hlm, 25.

⁴¹ Kyai Wahid adalah seorang konseptor pendidikan Indonesia yang sangat tangguh yang dibuktikan oleh kemampuannya menjadikan Kementerian Agama sebagai pengelola pendidikan bagi generasi muda Indonesia Dhofier, Zamakhsyari “ *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia,* Ibid, hlm. 149.

pendidikannya secara historis, melainkan untuk melihat lebih jauh tentang peluang dan kemungkinan dampaknya terhadap perkembangan pendidikan tinggi Islam dan ke arah perspektif baru yang lebih mengedepankan sisi prospek, tujuan terintegratif dan kepentingan di atas kemaslahatan kebijakan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi Islam yang berdasarkan nasionalisme kebangsaan dan kemanusiaan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi topik permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut ;

1. Mengapa Program Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Indonesia itu muncul di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim?
2. Bagaimana Pola Interaksi Sosio-Politik Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Pembahasan pada politik pendidikan tinggi Islam ini tentunya sangat luas, sehingga peneliti lebih fokus dengan membahas proses politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dengan telaah historis tokoh pada transformasi Fakultas Agama UII Ke PTAIN pada tahun 1949-1952 sehingga tidak melebar pada pembahasan dan variabel lainnya yang berhubungan dengan pembahasan ini.

D. Tujuan Penelitian

Agar dalam penelitian dapat mencapai hasil yang relevan sesuai dengan masalah, Maka ada beberapa tujuan dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang penulis lakukan adalah untuk menganalisis dan menemukan ;

1. Alasan-alasan personal dan sosio-politik munculnya program penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim khususnya dalam transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN.
2. Pola interaksi Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam di Indonesia khususnya dalam transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki guna atau manfaat, penelitian ini disamping berguna sebagai kajian akademik, juga dapat dipergunakan sebagai input bagi praktisi pendidikan Islam khususnya, Untuk itu lebih rinci manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ;

1. Secara teoritis memungkinkan bermanfaat untuk menambah dan mengembangkan khazanah keilmuan dalam fokus kajian politik pendidikan yang belum familier di Indonesia.
2. Secara praktis dapat menjadi input bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi praktisi politik pendidikan tinggi Islam di Indonesia, dengan melihat temuan pola interaksi yang masih relevan untuk dijadikan

sebagai acuan dalam proses politik pendidikan dalam menggerakkan perangkat-perangkatnya mencapai tujuan pendidikan Islam yang kosmopolit dan pancasilais.

3. Penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program doktoral pascasarjana dan berguna untuk memulai penelitian ilmiah yang menunjang penulis untuk berkarya lebih baik.

F. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian tentang pesantren yang peneliti jadikan sebagai tinjauan pustaka antarlain:

1. Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, tentang *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. (Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran Tokoh-tokoh Islam dalam Penyusunan UU No. 2/1989). Menjelaskan tentang peran tokoh-tokoh pemimpin Muslim dalam perumusan UUSPN atau No/ 2, 1989 mengenai sistem pendidikan Nasional Republik Indonesia. Kajian ini mempelajari alasan para pemimpin ikutserta dalam perdebatan mengenai rencana UU sistem pendidikan Nasional, apa sarasannya dan bagaimana mereka mengejar sasaran ini. Kajian ini memfokuskan kepada empat fokus isu utama; *pertama*, peran tradisional para pemimpin dalam proses pembentukan kebijakan pendidikan di Indonesia, *kedua*, tanggapan mereka terhadap peluncuran dan isi RUUSPN, *ketiga*, pembentukan partisipasi kelompok selama perdebatan,

dan *keempat*, pilihan strategi dan taktik pengaruh. Semua masalah ini dikaji dengan analisis kualitatif berdasar wawancara dan data dokumen, analisisnya bersifat kritis, berakar pada pengalaman politik dan sejarah nyata para pemimpin, dan dibatasi pada konteks pembentukan kebijakan pendidikan masa orde baru, 1965-1998.⁴²

2. Penelitian Mastuki. HS di Program Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 1997 tentang “ *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 1945-1975 (Sejarah dan Peranannya)*⁴³”. Penelitian ini berusaha melacak akar-akar historis kelahiran Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terutama sejak STI berdiri pada tahun 1945 sampai IAIN lahir dari sudut pandang sosio-historis (sejarah sosial) mulai tahun 1945-1975 mulai dari kemerdekaan sampai menjadi IAIN. Mastuki lebih menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang melatar belakangi lahirnya PTI, antarlain faktor ideologis, politis dan sosiologis yang kompleks. Selain itu juga menjelaskan peranan PTI dalam sudut pandang politis sebagai simbolisme politik Islam Indonesia. Dalam bidang sosial PTI berfungsi sebagai “saluran” mobilitas sosial dan vertikal relatif lebih terjamin, adapun dalam bidang pendidikan, PTI juga sebagai “Pabrik” yang akan melahirkan kelo mpok intelektual atau kalangan terpelajar. Peneliti ini lebih menekankan adanya kompleksitas factor munculnya PTI dalam sudut pandang sosio historisnya, baik secara ideologis,

⁴² M. Sirozi, *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. Disertasi (Australia: Monast University,) terj. hlm. 281.

⁴³ Mastuki. “ *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 1945-1975 (Sejarah dan Peranannya)*”, Tesis (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997), hal. 197-201.

politis dan sosologis pada tahun 1945 sampai 1975, sehingga tidak secara proporsional fokus pada pendekatan “ *The Politic Of Education*” dan tidak menonjolkan era Menteri Agama. Sehingga peneliti melihat masih terlalu luas substansi fokus pembahasan dan pendekatannya. Sehingga peneliti memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan penelitian ini, salah satunya dengan pendekatan politik pendidikan yang belum familier di Indonesia dan lebih fokus pada peristiwa-peristiwa di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim.

3. Disertasi Arif Rohman di program pasca sarjana Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) 2013, tentang “*Guru dalam Pusaran Kekuasaan, Potret Konspirasi dan Politisasi*”, penelitian ini menyimpulkan adanya politik dominasi penguasa daerah terhadap otonomi guru yang lebih dikenal dengan “politisasi guru” baik secara tersurat maupun tersi rat untuk meraih “kepentingan politik”. Praktik tersebut merupakan wujud dari *political relation* yang menjelma menjadi political bargaining dengan berujung pada *power sharing*. ‘ Politisasi guru’ sudah dirancang sedemikian rupa oleh penguasa daerah dalam bentuk ‘praktik terselubung’ secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh pihak lain. Praktek tersebut mereka namakan praktek ‘dibelakang layar’ atau ‘main belakang’. dari luar seolah tidak terjadi apapun, pihak yang akan mempermasalahkannya sulit menemukan buktinya, akan tetapi dari jejaring aktor-aktor terpilih, sebagian bertugas ‘mengamankan ring dalam’ dengan sasaran PNS termasuk guru negeri dan sebagian lain ‘membangun ring luar’ dengan sasaran termasuk

guru swasta. Komando jejaring PNS adalah pejabat Sekretaris Daerah, sedang sub-komando khusus guru SD adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar. Modus gerakan politiknya melalui aneka seminar dan workshop, pembicara seminar dan workshop tersebut adalah sudah dipaketkan yaitu elit politik yang di orbitkan. Oleh karenanya ‘*politisasi guru*’ tidak hanya berlangsung terselubung tetapi juga sistematis. Adapun bentuk politik dominasi penguasa daerah terhadap otonomi guru, dapat dinyatakan ada dua bentuk politisasi guru tersebut berupa politik *kooptasi* dan politik *chariti* atau pengambilan hati. Politik kooptasi dilakukan melalui penguasaan organisasi PGRI dengan cara menempatkan banyak birokrat pemerintah dalam kepengurusan teras PGRI. Politik *chariti* dilakukan dengan dua jurus, yaitu jurus donasi bantuan studi dan jurus insentif peningkatan kesejahteraan.⁴⁴

4. Penelitian Galih R.N Putra di Universitas Indonesia (UI) tentang *Politik Pendidikan; Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Penelitiannya tersebut berupaya mengkomparasikan liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dengan India. Dalam penelitiannya terdapat persamaan dan perbedaan dalam politik pendidikannya, persamaannya ialah politik pendidikan di Indonesia dan India sama-sama menunjang proses liberasi pendidikan karena keduanya mengeluarkan berbagai kebijakan pendidikan yang mendukung proses tersebut. *Kedua*, implementasi kebijakan liberasi pendidikan nampak pada berbagai PTN di Indonesia dan India. *Ketiga*,

⁴⁴ Arif Rohman “*Guru dalam Pusaran Kekuasaan, Potret Konspirasi dan Politisasi*”, Disertasi (Yogyakarta: Pasca UNY 2013), hlm. 202-204.

liberalisasi pendidikan tinggi menyulitkan akses masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia dan India untuk menikmati pendidikan tinggi karena mereka tidak mampu bersaing secara akademik dan finansial dengan masyarakat yang lebih mampu. *Keempat*, terdapat sikap pro dan kontra dari berbagai stakeholders terhadap liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dan India. *Kelima*, baik pemerintah Indonesia maupun India sama-sama memberikan beasiswa dan melakukan afirmasi terhadap masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan tinggi.⁴⁵

5. Penelitian Heny Maryamah tentang *Politic of Education; The Inclusion of Islamic Educational Institutions in the National Education System Law 20/2003*. Penelitian tersebut ada beberapa point penegasan tentang masuknya lembaga pendidikan Islam masuk pada sistem pendidikan nasional nomor 20 tahun 2003, *pertama*, adanya peran negara dalam mengakomodir kepentingan pendidikan Islam dari kelompok di daerah dengan baik melalui kekuatan nasional untuk menyatukan kembali pendidikan Islam, *kedua*, keberhasilan

⁴⁵ Juga dijelaskan tentang perbedaannya, antarlain *Pertama*, liberalisasi pendidikan tinggi di India lebih dulu dilakukan dibanding Indonesia. *Kedua*, struktur regulasi India lebih kompleks dibanding Indonesia sehingga berbagai PTN di India kebingungan untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan pendidikan pemerintah. *Ketiga* liberalisasi pendidikan tinggi di Indonesia dilakukan terhadap beberapa kampus BHMN yang dapat disamakan dengan universitas sentral di Indoa sedangkan proses yang relatif sama justru dilaksanakan pada universitas negara bagian dan IIT di India. Hal ini karena subsidi pemerintah terhadap universitas sentral JNL dan University of Delhi besar. Penelitian Galih R.N Putra di Universitas Indonesia (UI) tentang Politik Pendidikan; Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, (Jakarta: 2016, hal. 206-207).

dalam memasukkan lembaga pendidikan Islam pada sistem pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003.⁴⁶

6. Penelitian Heni Listiana, tentang “*Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam pada masa orde lama*” , membahas politik pendidikan masa orde lama tidak dapat dilepaskan dari perjuangan memasukkan materi agama disekolah. Sudah sejak lama pemerintah belanda menjadikan pendidikan agama terpisah dengan pendidikan sekolah dengan asumsi pendidikan sekolah itu netral dari pendidikan agama. Pendidikan agama menjadi urusan pribadi masing-masing dan bukan menjadi bagian integral dari bagian pendidikan sekolah. Pemisahan ini menjadi perbedaan yang sengit antara kaum nasionalis dan umat Islam dalam memandang pendidikan agama. Kaum nasionalis memiliki kecenderungan sinis dan apatis terhadap kaum muslim. Demikian kaum muslim berusaha untuk menyelamatkan kepentingannya dalam kancah politik Indonesia sebagai mayoritas. Tetapi menjadi hal yang menarik untuk dikaji adalah meskipun menteri agama lahir bekalangan, tetapi usaha yang dilakukan pasca kemerdekaan harus diakui sebagai upaya yang sangat luarbiasa dalam menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi umat Islam, terbukti dengan penyelenggaran guru yang pernah dijalankan. Upaya

⁴⁶ Heny Maryamah, “ *Politic of Education; The Inclusion of Islamic Educational Institutions in the National Education System Law 20/2003*”, dalam Jurnal Pesantren, (Vol 2 No. 2, 2010), hal. 39.

membangun kesejajaran dengan kementerian pendidikan dalam mengelola lembaga pendidikan menjadi hal tidak dapat dielakkan lagi.⁴⁷

7. Penelitian Achmad Zaini tentang *Kyai Abdul Wahid Hayim: His Contribution to Muslim Reform and Indonesian Nationalism during Twenty Century*, di *institut for Islamic Studies (US) McGill University, Montreal Canada tahun 1998*. Dalam penelitiannya Zaini menegaskan meskipun Wahid Hasyim berasal dari kelompok tradisional, sudah jelas bahwa dia menunjukkan, dengan dilandasi oleh keyakinan dan kemampuannya, suatu aktifitas yang maju dengan pendekatan yang modern, suatu hal yang cukup *comparable* dibandingkan dengan aktifitas yang dilakukan oleh koleganya dan kelompok muslim modernis dan sekuler. Dalam pendidikan, Wahid Hasyim sadar akan NU pada waktu itu masih sangat kekurangan intelektual dari bidang pelajaran umum, sebagaimana yang dikatakan olehnya bahwa “ *menemukan orang akademisi (pada bidang non keagamaan) dilingkungan NU bagaikan menemukan penjual es pada pukul satu di malam hari*”. adapun upaya yang dilakukan Wahid Hasyim adalah, *pertama*, dengan meningkatkan sistem pendidikan dikalangan kaum tradisionalis melalui pengenalan, misalnya, metode tutorial, memberikan mata pelajaran yang sekuler, dan membentuk pendidikan baru, yakni madrasah. *Pilot project*-nya memodernisasi sistem pendidikan pesantren adalah dengan mendirikan Madrasah *Nizamiyah* yang mengajarkan secara bersama-sama pengetahuan agama dan pengetahuan

⁴⁷ Penelitian Heni Listiana, “*Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam pada masa orde lama*” dalam *Jurnal Pendidikan Agama Islam* , (Vol 2 No 2 November 2013).hlm.394-398.

umum. *Kedua*, Wahid Hasyim juga mengilhami berdirinya institusi profesional guru agama (PGA) dan perguruan Tinggi, dimana PGA dibentuk bertujuan untuk membekali siswa kemampuan mengajar dengan metode yang modern, sedang perguruan tinggi agama adalah institusi dimana lulusan madrasah dapat melanjutkan program pendidikan tingginya. *Ketiga*, Wahid Hasyim juga mengintruksikan untuk memberikan pelajaran agama kepada siswa-siswa sekolah umum, agar supaya kemampuannya lengkap baik umum dan spiritualnya. Berkaitan dengan aktifitas politiknya, *pertama*, Wahid Hasyim mampu membangun jaringan pesantren (*a pesantren network*), membuat manuver terhadap pemerintah Jepang untuk memberikan fasilitas yang dapat digunakan untuk mempersiapkan kader-kader untuk melawan penjajah “*laskar hisbullah*”, *kedua*, sebagai anggota BPUPKI yang kemudian menghasilkan piagam Jakarta, dengan kronologis beberapa usulannya tidak diterima oleh panitia amandemen, hal ini menunjukkan adanya sikap

akomodatif dari diri Wahid Hasyim.⁴⁸

8. Penelitian Moh. Toriqul Chaer yang menjadi penelitian terbaik ke-dua di Universitas Wahid Hasyim Semarang 2011, tentang : *K.H Wahid Hasyim dan Rekontruksi Paradigma Pesantren*, menjelaskan bahwa terdapat beberapa konsep rekontruksi paradigma pendidikan, antarlain komponen tersebut adalah memunculkan urgensi kecakapan hidup (*Vokasional*) pada dunia pesantren, kemudian adanya *setting* ulang KH Wahid Hasyim terhadap

⁴⁸ Zaini, Achmad , “ *Kyai Abdul Wahid Hayim: His Contribution to Muslim Reform and Indonesian Nationalism during Twenty Century*”, (di *institut for Islamic Studies (US) McGill University, Montreal Canada, 1998*), trj. hlm. 93-97.

idealita tujuan pendidikan dalam Islam dengan memberikan penekanan pada aspek pendekatan *antroposentris* sebagai upaya untuk membumikan ajaran Islam secara realistis, faktual dan *update*. KH Wahid Hasyim juga memberi tawaran antitesis terhadap pendekatan kajian ilmu umum dan ilmu agama, yakni *integratif-interkoneksi*, yakni, merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu keislaman (*Islamic Science*) dengan ilmu-ilmu umum (*modern science*), yang mencakup tiga dimensi, *hadlarah al-nas*, *hadlarah al-ilm*, dan *hadlarah al-falsafah*. Realitas inilah yang ingin dibongkar Wahid Hasyim, bahwa materi yang diajarkan di pesantren haruslah ilmu-ilmu yang komprehensif.⁴⁹

9. Disertasi Choirul Mahfud pada program pasca sarjana Universitas Islam (UIN) Sunan Ampel Surabaya dengan judul “ *Politik Pendidikan Islam, Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*”, pada tahun 2014. Penelitian ini mencoba mendeskripsikan, memetakan beberapa tipologi kebijakan dan menguraikan dampak praktisnya pada kebijakan pendidikan Islam era pasca orde baru. Penelitian ini mendeskripsikan bahwa kebijakan era pasca orde baru ada yang menguntungkan juga ada yang merugikan. Sedangkan pada tipologi kebijakan, penelitian ini memetakan beberapa tipologi, antarlain *pertama*, tipologi kebijakan adaptif, *kedua*, tipologi kebijakan akomodatif, *ketiga*, tipologi kebijakan deskriminatif, *keempat*, tipologi kebijakan integratif, *kelima*, tipologi kebijakan reformatif. Kemudian pada dampaknya atas kebijakan pasca orde baru, lebih dilihat pada

⁴⁹ Penelitian Moh. Toriqul Chaer, tentang : *K.H Wahid Hasyim dan Rekonstruksi Paradigma Pesantren*, yang menjadi penelitian terbaik ke-dua di Semarang, Universitas Wahid Hasyim, 2011.

aspek kurikulumnya yang lebih cenderung adaptif, aspek anggarannya lebih diskriminatif dan terkadang akomodatif. Dalam aspek kelembagaannya cenderung integrative dan reformatif. Dan pada aspek guru agama Islamnya, kebijakannya lebih cenderung reformatif.⁵⁰ Penulis melihat, hasil penelitian ini memiliki kekurangan dan kelebihan, kelebihan penelitian ini pembahasannya kompleks dari aspek politik, pendidikan dan khususnya pada kebijakan pendidikannya. Akan tetapi penulis melihat kekurangannya lebih pada konteks fokus penelitiannya pada praksis kebijakan dan dampaknya, bukan pada relasi proses dan langkah politik pendidikannya. *Wallahu a'lam bisyowab.*

10. Disertasi M. Saerozi, di IAIN Sunan Kalijogo Tahun 2003 tentang "*Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme, tela'ah Historis Atas Kebijaksanaan Pendidikan Agama Konfesional di Indonesia*".⁵¹ Dalam penelitian ini, memberikan satu asumsi bahwa kebijaksanaan Negara tentang pola pendidikan agama yang relevan dengan falsafah Pancasila adalah pola konfesional dengan pola Negara memberikan legitimasi bagi pendidikan agama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan subjek didik pada agama masing-masing. Unsur konfesional dalam kebijaksanaan pendidikan di Indonesia tampak beberapa aspek, pertama, pendekatan pendidikan agama yang teologis, tetapi terkontrol melalui pendekatannya lain yang bekerja secara

⁵⁰ Mahfud, Choirul., "*Politik Pendidikan Islam, analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia pasca orde baru*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016, hal. 374-379.

⁵¹ Lihat M. Saerozi, M.Ag., "*Politik Pendidikan Agama dalam Era Pluralisme, tela'ah historis atas kebijaksanaan pendidikan agama a konfesional di Indonesia*". Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijogo, 2003. Hal. 169.

konstekstual. Kedua, pendidik yang diisyaratkan beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa. Ketiga, praktik ibadah dan acara-acara keagamaan yang dilakukan di sekolah negeri. Keempat, pendidikan bukan hanya dialokasikan kepada lembaga pendidikan yang bersifat umum, tetapi juga untuk lembaga pendidikan keagamaan, swasta berciri khusus agama.

Dalam penelitian ini menemukan akar historis pola pendidikan konfesional yang panjang, dari sisi subjeknya, kebijakan segregatif dapat dibedakan menjadi tiga pola, (1) kebijaksanaan segregatif pola portugis, (2) kebijaksanaan segregatif pola VOC, (3) kebijaksanaan segregatif pola pemerintah hindia belanda. Dalam konteks pluralismenya, pluralism agama konfesional sebagai kebijakan Negara mempunyai lima prinsip dasar, yaitu (1) mengakui tiap-tiap kelompok keyakinan warganya, (2) mendorong secara spesifik agar tiap kelompok tersebut mengamalkan nilai keimanan dan ketaqwaan masing-masing. (3) membina individu dalam tiap-tiap kelompok tersebut mengamalkan nilai kemanan dan ketaqwaan masing-masing. (4) membuka pintu akses partisipasi bagi kelompok keyakinan minoritas (KKM) dalam ranah kekuasaan. (5) memberdayakan kelompok keyakinan yang tertindas.

Dengan demikian, penelitian-penelitian di atas memiliki fokus pembahasan yang berbeda khususnya dengan penelitian yang menjadi fokus kajian penulis tentang *Politik Penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim (Tela'ah Historis Transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN di Indonesia)*; belum pernah diteliti, sehingga

hal ini yang menjadi distingsi fokus kajian yang dominan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

G. Metodologi Penelitian

Secara metodologis awalnya kajian politik pendidikan masih kurang mendapat keseriusan oleh para peneliti, juga minimnya identitas intelektual dalam bidang kajian politik pendidikan. Akan tetapi minat kajian ini semakin lama semakin berkembang, banyak peneliti yang membahas relasi pendidikan dan politik, khususnya di Negara Amerika, Australia dan Inggris. Menurut Iannaconne dan Ciston cenderung lebih mengaitkan problem metodologis tersebut dengan keseriusan para peneliti politik pendidikan, berkembang atau tidaknya metodologi kajian politik pendidikan secara substantif banyak dipengaruhi oleh agenda dan strategi penelitian yang dipilih oleh para peneliti.⁵² Artinya, secara metodologis setiap peneliti memiliki kesempatan luas dalam mengembangkan kajian politik pendidikan dalam aspek metodologisnya.

Sedangkan di Indonesia yang termasuk dalam Negara berkembang juga masih dalam proses yang bertahap. Survei, studi kasus, analisis kebijakan, analisis sistem dan studi politik telah mendapat identitas secara metodologis

⁵² Berkembang atau tidak kajian politik pendidikan sangat tergantung pada seberapa serius peneliti dalam mengembangkan secara metodologis maupun secara akademis. Sejalan dengan hal tersebut, Harman juga menegaskan berkembang atau tidak kajian politik pendidikan Islam tergantung pada peneliti dalam (a) secara kritis meninjau penelitian yang sudah ada, (2) menangani problem metodologi, teoritik, praktikal, (3) serius untuk mendiskusikan prioritas-prioritas untuk penelitian kedepan. Lihat M. Sirozi., "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 144-145.

dalam kajian politik pendidikan.⁵³ Tentunya hal ini yang kemudian menjadi motivasi penulis dalam aspek metodologisnya.

Dalam pandangan filosofisnya, penelitian ini merupakan sintesa dari suatu proses tahapan dalam mendesain suatu penelitian. Dari pandangan *wordviews* konstruktivis yang dijelaskan oleh *Cresswell* tentang Desain Penelitian Kualitatif merupakan proses Pemahaman, Makna yang beragam dari partisipan, Konstruksi Sosial dan Historis serta Penciptaan Teori.⁵⁴ Menurut Eliot, juga bisa studi dalam sejarah peraturan perundang-undangan pendidikan,⁵⁵ Harman juga menawarkan studi tentang persoalan diseputar kebijakan, selain melihat perbedaan antar institusi, pola-pola perilaku, juga mempertanyakan implikasinya, serta mengembangkan dengan menganalisis tentang dampak kebijakan pendidikan terhadap kualitas dan jenis pelayanan pendidikan yang disediakan, dan kehidupan peserta didik dan anggota masyarakat.⁵⁶ Penganalisisan kebijaksanaan Negara dari sudut proses lebih bersifat deskriptif.⁵⁷

Sebagai ahli dalam politik pendidikan di Indonesia tentunya potensi yang sangat jarang, Prof. Sirozi dalam bukunya politik pendidikan

⁵³ M. Sirozi., "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 132-139.

⁵⁴ Lihat Cresswell, John W., "*Research Design*" *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*", Ibid. 2010. hlm. 8.

⁵⁵ Lihat M. Sirozi., "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 151.

⁵⁶ Lihat M. Sirozi., "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 149.

⁵⁷ Deskriptif dimaksudkan dengan mencoba menggambarkan bagaimana kebijaksanaan Negara itu dibuat. Termasuk kedalam pengelompokan penganalisisan proses ini adalah model-model; institusional, elit-massa, kelompok dan sistem. Lihat Islamy, Irfan., "*Prinsip-prinsip dalam perumusan kebijaksanaan Negara*" , Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2014. Hal. 36.

mengemukakan bahwa dalam konteks keindonesiaan, kajian politik pendidikan dapat dikembangkan dengan beberapa fokus yang berkaitan dengan era otonomi daerah, perlu digalakkan studi tentang kebijakan, otoritas, dan peran kependidikan pemerintah pusat dan daerah; dan analisis berbagai

kebijakan pendidikan, baik yang dibuat untuk skala nasional maupun daerah.⁵⁸

Untuk itu, sebagai penulis yang ingin lebih serius mendalami fokus kajian politik pendidikan ini, maka penulis mencoba mengkolaborasi saran dan penawaran dari masing-masing tokoh, baik dari Iannaconne, Harman, Eliot dan khususnya M. Sirozi dalam konteks fokus kajian dalam politik pendidikan. Sehingga penulis secara metodologis menggunakan tela'ah historis⁵⁹ atau sejarah proses politiknya pada transformasi Fakultas Agama-UII Ke PTAIN era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim , sehingga dalam konteks kajian ini, politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia layak diteliti karena belum ada yang meneliti fokus pada kajian ini.

Karena dalam pendidikan Islam tentunya secara teoritis, tidak bisa lepas dari sejarah. Dunia tiak akan pernah berubah kecuali dengan sejarah, berbagai pergolakan yang kita alami sekarang dan usaha yang kita tempuh untuk lepas dari kekelaman masa lalu, tidak akan pernah tuntas tanpa melihat akar-akar

⁵⁸ Lihat M. Sirozi., "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kep entingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 152.

⁵⁹ Sejarah adalah pengetahuan tentang proses-proses berbagai realitas dan sebab-musababnya secara mendalam. Lihat Ibnu Khaldun, Kitab *Al I'bar wal Diwan Al-Mubtada' Wa Al-Khabar (Edisi Bulaq)*, Juz 1, hlm 3 yang dikutip oleh Abdullah, Yusri Abdul Ghani *Mu'jam al-Mu'arrikin al-Muslimin: Hatts Al-Qur'an al-Tsani 'Asyr al-Hijri*, terj. oleh Sudrajat, M.A. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2004. hlm. 66.

dan sebab-sebab permasalahannya dalam rekaman sejarah.⁶⁰ Dengan demikian sepertinya penting dan perlu suatu pendekatan secara metodologis terkait kajian politik pendidikan Islam di Indonesia menggunakan analisis politik pendidikan. Untuk itu, penulis tegaskan kembali peneliti penulis gunakan adalah telaah historis tentang proses penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia dengan dengan menilik lebih jauh manuver kepentingan dan kekuatan di era Menteri Agama Wahid Hasyim khususnya dalam proses transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN yang tentunya memiliki implikasi besar terhadap perkembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia saat ini.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kajian kepustakaan (*library research*) dengan konteks politik pendidikan yang bercorak historis, sehingga penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁶¹ Dalam konteks ini sebagaimana dikemukakan Bakker dan

⁶⁰ Setiap permasalahan yang menimpa manusia selalu memiliki akar dan sebab yang tertanam dalam tradisi yang kita warisi dari pendahulu kita. Lihat Abdullah ,Yusri Abdul Ghani *Mu'jam al-Mu'arrikhin al-Muslimin: Hatts Al-Qur'an al-Tsani 'Asyr al-Hijri (Historiografi Islam, dari klasik hingga modern)*, terj. Oleh Sudrajat, M.A. Ibid. hlm. 199-200.

⁶¹ Proses Penelitian Kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulaidari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data. Penelitian ini memiliki struktur atau kerangka yang fleksibel, dan harus menerapkan cara pandang penelitian yang bergaya induktif, berfokus pada makna individual, dan menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan. Lihat

Zubair masalah yang dikaji termasuk dalam kategori materi kefilosofan dengan model penelitian historis-faktual mengenai peran tokoh.⁶² Disisilain, Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia terkadang perspektif berdasarkan peneliti sendiri.⁶³ Penelitian ini lebih memahami secara luas dan mendalam dari apa yang diteliti, metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁶⁴ Makna tersebut merupakan hasil interpretasi peneliti itu sendiri dengan data-data dan fakta yang ada sehingga dalam hal ini, data-data, terutama dokumen tentang tranformasi Fakultas UII ke PTAIN era Menteri Agama Wahid Hasyim menjadi penting untuk dikumpulkan sebagai data primer.

Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendefinisikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁶⁵ Metodologi merupakan suatu metode yang bersifat sistematis dan bertujuan dalam penelitian. Metode merupakan cara seseorang mengumpulkan dan menganalisis data atau rancangan suatu metode dan rasionalitas⁶⁶ dalam

Cresswell, John W, “ *Research Design*” *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thir Edition*”, Trj. Fawaid Achmad., Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010. 4-5.

⁶² Bakker dan Zubair., “ *Metodologi Penelitian Filsafat*,” Kanisius, Yogyakarta, 1994, hal. 61.

⁶³ Imam Gunawan., “ *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*”, Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hal. 80.

⁶⁴ Suharsimi Arikunto., “ *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*” , Jakarta, Rineka Cipta, 2013, hal. 15.

⁶⁵ Nana Sukamadinata, “ *Metode Penelitian Pendidikan*”, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2005, hal. 60.

⁶⁶ Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, tentang *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in*

metode yang dipakai dalam memilih, mengumpulkan, dan menganalisis data untuk kajian ini, baik pada strateginya dan pelaksanaannya suatu metode tersebut. Demikian karena objek formalnya yang khas, membawa konsekuensi bagi metodologi studi dan penulisan karya ilmiah dalam bidang ini.⁶⁷

Dengan upaya memahami secara holistik dan komprehensif tentang proses transformasi pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim sebagai cendekiawan muslim Indonesia yang tidak diragukan lagi sumbangsuhnya bagi pendidikan Nasional, serta ingin lebih jauh menganalisis proses politik yang terjadi di era tersebut dalam penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Dipilih metode kualitatif atas dasar karena peran subjek atau peneliti memegang peran sentral. Ia bukan sekedar orang yang memberikan makna terhadap data dan fakta tetapi sekaligus sebagai alat atau instrumen penelitian itu sendiri.⁶⁸ Dalam penelitian ini lebih objektif dengan menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada. Penelitian ini bersifat pengembangan, yaitu melengkapi dan memperluas teori yang telah ada.⁶⁹ Salah satu karakteristik penelitian kualitatif adalah berfokus pada proses-proses yang terjadi, atau hasil dan outcome, juga tertarik pada

the leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989. INIS Leiden –Jakarta. 2004. hal.81.

⁶⁷ Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hal. 5.

⁶⁸ Wina Sanjaya., “ *Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*” , Jakarta, Prenada Media Group, 2013. hal. 46.

⁶⁹ Sugiyono., “ *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*”, Bandung, Alfabeta, 2003, hal. 288.

usaha memahami bagaimana sesuatu itu muncul.⁷⁰ Untuk itu, dalam konteks kajian politik penguatan institusi pendidikan tinggi Islam di Indonesia ini lebih melihat proses munculnya program transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN beserta alasan-alasannya sekaligus melihat sejauhmana pola interaksinya Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam proses tersebut.

Disisilain, hasil penelitian kualitatif sesuai dengan prosedur berupa deskriptik anaktik, yaitu uraian naratif mengenai suatu proses tingkah laku subjek sesuai dengan masalah yang ditelitinya, temuan-temuan penelitian berupa konsep-konsep bermakna dari data dan informasi dikaji dan disusun untuk menyusun preposisi-preposisi ilmiah atau teori dan hipotesis.⁷¹ Tentunya proses tersebut berkaitan dengan tujuan, rencana, strategi politik pendidikan tinggi Islam di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim serta dampaknya bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia dengan menganalisis secara kritis historis.

Dalam hal ini, Prof. M. Sirozi juga mengemukakan bahwa pengalaman bangsa Indonesia pada masa awal kemerdekaan memperlihatkan betapa penting arti pendidikan bagi bangunan politik dan sebaliknya, betapa penting arti politik bagi perkembangan pendidikan. Sebagian besar pejabat pengisi struktur lembaga-lembaga politik adalah kaum terdidik dan *political will* pemerintah atau para *founding fathers* kita saat itu adalah faktor kunci

⁷⁰ Lihat Cresswell, John W, “*Reseach Design*” *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thir Edition*”, terj. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2010. Hal. 293.

⁷¹ Amirul Hadi dan Haryono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, CV. Pustaka Setia, Bandung, 1998, hal. 17.

yang melahirkan sistem Pendidikan Nasional Indonesia termasuk Era Menteri Agama Wahid Hasyim⁷² yang terjun secara langsung dalam bidang politik dan pendidikan, sehingga kompleksitas proses politik pendidikan di era tersebut tidak diragukan lagi untuk diteliti sehingga menjadi bagian konstruksi paradigma bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam konteks politik pendidikan, Prof. M. Sirozi menegaskan bahwa pengalaman panjang bangsa Indonesia tercatat dalam sejarah, mulai dari era kolonial hingga era reformasi, memperlihatkan betapa pendidikan dan politik saling berkaitan kelindan, keterkaitan tersebut dapat dilihat dari karakteristik berbagai kebijakan pendidikan yang dibuat oleh rezim yang berkuasa. Dengan demikian, kebijakan diskriminasi pendidikan tersebut disertai agenda politik, selain dapat dilihat kerangka kebijakannya, agenda-agenda politik dalam kebijakannya juga bisa dilihat dari struktur kelembagaannya.⁷³ Maka dengan demikian, konteks politik pendidikan layak digali dalam suatu analisis kritis historis dengan menggunakan sumber-sumber primer yang layak dan akuntabel.

⁷² M. Sirozi, "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 122-123

⁷³ M. Sirozi, "*Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,*" Ibid., hlm. 122-123

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, pendekatan politik pendidikan khususnya pada prosesnya penguatan pendidikan tinggi Islam dengan telaah historis politis yang bersifat deskriptif pada transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN di era menteri Agama Wahid Hasyim. Kajian sejarah merupakan kajian yang mengungkapkan fakta-fakta itu menjadi karya ilmiah yang bermakna. dalam konteks politik pendidikan, tentunya membahas manuver-manuver kepentingan dan kekuatan antar kelompok dan antar kekuatan, maka dalam konteks ini sebenarnya sangat relevan jika dalam penelitian historis ini juga bisa jadi membahas tentang fakta-fakta, peristiwa dan kasus⁷⁴ yang terjadi di era itu.

⁷⁴ Peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Studi kasus merupakan strategi penelitian dimana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Lihat Cresswell, John W,

“ *Research Design*” *Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Third Edition*”, Ibid. 2010. Hal.20. Gunawan yang menegaskan bahwa studi kasus adalah penelitian yang menempatkan sesuatu objek yang dapat disebut sebagai “kasus”, dan secara jelas, hal ini terbagi pada dua kelompok perdebatan tentang definisi studi kasus. Kelompok *pertama*, studi kasus adalah penelitian terhadap suatu objek yang disebut dengan kasus yang diteliti secara menyeluruh, utuh dan mendalam. Sedangkan kelompok *kedua*, mendefinisikan studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang dibutuhkan untuk meneliti atau mengungkapkan secara utuh dan menyeluruh terhadap kasus. Lihat Gunawan, Imam, “ *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*”, Ibid. hal. 113. Arikunto juga memberikan penjelasan bahwa strategi studi kasus sebagai salah satu jenis pendekatan deskriptif, penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap suatu organisme (individu), lembaga atau gejala tertentu dengan daerah atau subjek yang sempit. Lihat Arikunto yang dikutip oleh Gunawan, Imam, “ *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*”, Ibid. hal. 116. Lihat Juga Bogdan & Biklen (2007) “ *case study a detail examination of a setting or one single subject, or a single depository of document, or one particular event*”. (Study kasus merupakan pengujian secara rinci terhadap satu latar atau satu orang subjek atau satu tempat penyimpanan dokumen atau satu peristiwa tertentu). dikutip oleh Gunawan, Imam, “ *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*”, Ibid. hal. 117. James Fesler. Menyimpulkan bahwa study kasus sangat bernilai karena tidak terbatas pada pencatatan urutan-urutan berbagai kejadian (*chronicling*) tetapi menyajikan pemahaman analitik tentang proses keputusan, kerangka politik dan organisasi, dan persoalan kebijakan substantive yang dapat ditemukan dalam lembaran hidup pemerintah (*a Slice of Government*

Selain itu, penelitian ini juga ingin menggambarkan peristiwa yang telah terjadi di Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam penguatannya pendidikan tinggi Islam di Indonesia karena penelitian ini juga merupakan penelitian sejarah. Penelitian sejarah merupakan penelitian yang menggambarkan peristiwa yang telah terjadi pada era tertentu melalui pengumpulan dan evaluasi data, untuk memahami kejadian-kejadian dan praktik pendidikan pada masa lampau, bukan mengkaji masalah yang aktual atau masalah kekinian sebagaimana dalam penelitian deskriptif.⁷⁵ Khususnya untuk memprediksi prosesnya yang berhasil yang kemudian bisa jadi ada kesesuaian jika diterapkan pada masa sekarang serta mengkonstruksi proses tersebut sebagai bagian dari sifat yang layak untuk dijadikan sebagai acuan atau pembelajaran di era sekarang. Sejarah selalu terkait dengan berbagai disiplin ilmu dan akan senantiasa berkaitan serta saling menopang satu sama lainnya.⁷⁶

Sedang sasaran pendekatan ini lebih di orientasikan pada deskripsi dan analisis deskriptif. Pada tahap deskripsi kajian yang ditonjolkan peristiwa-peristiwa dan rencana politik pendidikannya dalam formulasi kebijakan politik pendidikannya era Menteri Agama Wahid Hasyim. dalam konteks ini,

Life). Lihat M. Sirozi., “Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan,” *Ibid.*, hlm. 134.

⁷⁵ Lihat Wina Sanjaya. “Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur. *Ibid.* hal. 111-114.

⁷⁶ Urgensi sejarah merupakan hal yang tidak bisa dielakkan lagi, karena dengan kajian sejarah memiliki relasi penting dan kuat antara fakta masa lalu dengan fakta sekarang atau masa depan, tentunya hal ini berguna sebagai pembandingan atau inspirasi, Lihat Abdullah ,Yusri Abdul Ghani *Mu'jam al-Mu'arrikhin al-Muslimin: Hatts Al-Qur'an al-Tsani 'Asyr al-Hijri (Historiografi Islam, dari klasik hingga modern)*, terj. Oleh Sudrajat, M.A. *Ibid.* hlm. 200-201.

maka sejarah mengkaji peninggalan-peninggalan masa silam yang bermanfaat untuk menafsirkan dan menjelaskan keadaan masa kini. ini yang menjadi esensi dari kajian sejarah, artinya, sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan sejarah jelas sangat berbeda dengan ilmu-ilmu alam yang eksperimental, melainkan ilmu pengetahuan, kritik dan analisis yang memiliki objek kajiannya adalah hal-hal yang terjadi di masa lampau dan memiliki kontinuitas di masa kini, baik berbentuk data-data, peninggalan material, maupun pengaruh-pengaruh peristiwa yang telah terjadi.⁷⁷ Pada tahap evaluasi kritis, ditampakkan juga pada kajian kritis pada munculnya program, pengaruh dan interaksinya. Kemudian juga ingin melihat sejauhmana relevansi secara teoritis yang bisa bermanfaat dari proses politik pendidikan era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim khususnya pada pengembangan pendidikan Tinggi Islam di Indonesia di masa yang akan datang.

Upaya yang dilakukan oleh kementerian agama era Wahid Hasyim dalam proses transformasi pendidikan tinggi Islam memiliki kepentingan signifikan, yakni memperjuangkan kepentingan “Nasionalisme” di Indonesia. Terlepas dari itu, jika dilihat dalam sejarah latar belakang berdirinya

⁷⁷ Konfucius sebagai filsuf China abad ke 6 SM juga menegaskan manfaat dari sejarah “*sejak lama orang-orang mengkaji masa lalu mereka guna mengembangkan kehidupan mereka! Kajian sejarah merupakan sarana utama yang netral yang memberikan kesadaran kolektif dan mengajari manusia bagaimana melihat masa silam dan mengenal nenek moyang mereka berikut pemikirannya meskipun dipisahkan jarak antar generasi selama ribuan tahun*”. Dengan demikian sejarah merupakan rangkaian dan kontinuitas dari berbagai peristiwa. Lihat Abdullah, Yusri Abdul Ghani *Mu'jam al-Mu'arrikhin al-Muslimin: Hatt Al-Qur'an al-Tsani 'Asyr al-Hijri (Historiografi Islam, dari klasik hingga modern)*, terj. Oleh Sudrajat, M.A. Ibid. hlm. 204-208.

departemen agama pertama di Indonesia juga demikian atas proses memperjuangkan kepentingan umat Islam. Menurut M. Sirozi yang mengutip dari Dye bahwa “kebijakan pendidikan mempengaruhi r agam kepentingan yang luas, dan merangsang banyak sekali kegiatan kelompok kepentingan.”

⁷⁸ Kajian ini merupakan upaya untuk memahami proses yang dilakukan di era Menteri Agama Wahid Hasyim dalam konsolidasi proses transformasi pendidikan tinggi Islam di Indonesia khususnya pada transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN pada tahun 1950 dengan menjelaskan bagaimana ide itu muncul, bagaimana proses konsolidasinya, serta bagaimana cara dan strateginya era menteri agama Wahid Hasyim dalam mencapai tujuan tersebut, Pendekatan analisis deskriptif yang didefinisikan secara longgar di pakai dalam penelitian ini. Penulis memprediksi proses transformasi pendidikan tinggi termasuk sampai pada penyusunan dan pelaksanaan PP. No. 34 Tahun 1950 tentang pendirian PTAIN di bawah sorotan konteks politis, edukatif dan historis yang luas perannya, sehingga pendekatan politik dalam penulisan sejarah tentunya menghasilkan sejarah politik.

Penelitian semacam ini secara umum dapat dilakukan dengan empat langkah, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.⁷⁹ Heuristik adalah langkah pengumpulan dan pemburuan berbagai sumber data sejarah melalui pelacakan atas berbagai dokumen sejarah, situs sejarah, dan

⁷⁸ Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, tentang *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. INIS, Jakarta. hal.7.

⁷⁹ Penjelasan selanjutnya merujuk pada Hariyono “ *mempelajari Sejarah secara efektif*”, yang dikutip oleh Ismail “ *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*”. CV. Idea Sejahtera. Yogyakarta. 2014. hal. 18-19 .

wawancara dengan orang-orang tertentu. Langkah kritik adalah upaya peneliti untuk mengkritisi dan menguji sumber dan data sejarah yang sudah dikumpulkan. Dalam hal ini peneliti sejarah harus melakukan kritik ekstern dan kritik intern. Kritik Ekstern dilakukan untuk menguji keaslian atau otentitas sumber sejarah dan membedakan antara sumber sejarah yang asli dengan yang palsu. Kritik intern dilakukan untuk menguji validitas data sejarah. Kritik ekstern dan intern menghasilkan fakta sebagai data yang telah terseleksi. Langkah Interpretasi adalah upaya peneliti untuk menafsirkan-berdasarkan perspektif tertentu-fakta sejarah sebelum dan selama proses rekonstruksi fakta itu menjadi bentuk dan struktur yang logis. Langkah historiografi adalah menuliskan hasil penafsiran di atas menjadi tulisan atau

karya sejarah yang utuh dan bermutu.⁸⁰ Analisis ini bersifat deskriptif, yakni analisis yang berupaya memaparkan fakta-fakta sejarah apa adanya tetapi juga berangkat dari kajian sejarah yang sudah ada sebelumnya. Tentunya hal ini menjadi sulit bagi peneliti sendiri, karena dalam konteks kajian politik pendidikan belum familier di Indonesia, sehingga kajian sebelumnya lebih dominan pada kajian sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia, salah satunya penelitian dari Mastuki. HS pada tahun 1997 di IAIN Syarif

Hidayatullah Jakarta⁸¹.

⁸⁰ Lihatt Ismail “ *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*”. CV. Idea Sejahtera. Yogyakarta. 2014. hal. 18-19 .

⁸¹ tentang “ *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 1945-1975 (Sejarah dan Peranannya)*”, penelitian ini berusaha melacak akar-akar historis kelahiran Perguruan Tinggi Islam (PTI) di Indonesia terutama sejak STI berdiri pada tahun 1945 sampai IAIN lahir dari sudut pandang sosio-historis (sejarah sosial) mulai tahun 1945-1975 mulai dari kemerdekaan sampai menjadi IAIN. Mastuki lebih menjelaskan bahwa terdapat beberapa faktor penting

3. Sumber Data

Dokumen sesungguhnya adalah sumber data yang siap pakai, dalam bentuk rentangan luas bahan tertulis dan fisik termasuk catatan umum atau arsip.⁸² Karena kajian ini secara garis besar banyak berkaitan dengan proses politik pendidikan di era menteri agama Wahid Hasyim maka sumber primernya adalah dokumen, rekaman-rekaman kuantitas (*Quantitatif Records*), kesaksian (*Oral Testimonies*), dan *Relics*.⁸³ Sehingga dengan demikian dapat diungkapkan dengan jelas dan akurat tentang proses penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim khususnya pada transformasi Fakultas Agama UII Ke PTAIN. Dalam hal ini tentunya pertelaan-pertelaan pada suatu konferensi, tulisan K.H. A. Wahid Hasyim, teman serta lawan politiknya yang samasa,

yang melatar belakangi lahirnya PTI, antarlain faktor ideologis, politis dan sosiologis yang kompleks. Selain itu juga menjelaskan peranan PTI dalam sudut pandang politis sebagai simbolisme politik Islam Indonesia. Dalam bidang sosial PTI berfungsi sebagai “saluran” mobilitas sosial dan vertikal relatif lebih terjamin, adapun dalam bidang pendidikan, PTI juga sebagai “Pabrik” yang akan melahirkan kelompok inte lektual atau kalangan terpelajar. Peneliti ini lebih menekankan adanya kompleksitas factor munculnya PTI dalam sudut pandang sosio historisnya, baik secara ideologis, politis dan sosologis pada tahun 1945 sampai 1975, sehingga tidak secara proporsional fokus pada pendekatan “*The Politic Of Education*” dan tidak menonjolkan era Menteri Agama. Sehingga peneliti melihat masih terlalu luas substansi fokus pembahasan dan pendekatannya. Sehingga peneliti memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan penelitian ini, salah satunya dengan pendekatan politik pendidikan yang belum familier di Indonesia dan lebih fokus pada peristiwa-peristiwa di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim.

⁸² Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, Ibid. 99.

⁸³ Dokumen adalah rekaman atau catatan-catatan kejadian dimasa lalu (*record of past event*), umum atau pribadi, dicetak atau tidak, contohnya surat, bku harian, jurnal, surat kabar, dan berbagai regulasi kebijakan. Sedangkan QR adalah bagian dari dokumennamun rekaman atau catatan kuantitas memiliki kekhasan sendiri sehingga dipisahkan dari dokumen. Kemudian Kesaksian merupakan kesaksian-kesaksian atau pernyataan-pernyataan yang diucapkan seseorang (*oral statements*) atau transkrip percakapan. Kemudian *relics* adalah objek tertentu yang dapat memberikan informasi tentang kejadian-kejadian yang telah berlalu atau peninggalan-peninggalan masa lalu, misalnya buku teks, bahan-bahan, bangunan dll. Lihat Wina Sanjaya., “*Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*”, Ibid. hal. 116-117.

seta buku sejarah hidup Wahid Hasyim dan karangan tersiar yang disusun oleh Aboe Bakar Atjeh⁸⁴ tentunya juga bisa menjadi sumber primer pada penelitian ini, karena beliau adalah satu-satunya penulis yang memahami dan mengerti serta mengumpulkan karya-karya K.H. A. Wahid Hasyim sekaligus tokoh yang hidup di masa itu khususnya fokus pada kajian pendidikan tinggi

⁸⁴ Prof. Dr. KH. Aboebakar Atjeh (atau Abubakar Aceh atau Abu Bakar Aceh atau Hadji Aboebakar) adalah cendekiawan terkenal dari Aceh sekaligus penulis buku-buku keagamaan, filsafat dan kebudayaan. Lahir dengan nama Aboebakar pada 18 April 1909 di Peureumeu, Kabupaten Aceh Barat, dari pasangan ulama. Ayahnya adalah Teungku Haji Syekh Abdurahman, imam Masjid Raya Kutaradja (sekarang lebih sering disebut sebagai Masjid Raya Baiturrahman). Ibunya bernama Teungku Hajjah Naim. Aboebakar Atjeh meninggal pada 18 Desember 1979 di Jakarta, dan dimakamkan di TPU Karet Bivak Jakarta. Tambahan “Atjeh” di belakang namanya merupakan pemberian Presiden Soekarno yang kagum akan keluasan ilmu putra Aceh ini. “Ensiklopedia Berjalan” adalah sebutan teman-temannya tentang hakikat ilmu pengetahuannya. Nama Aboebakar Atjeh masuk dalam buku *Seratus Tokoh Islam yang Paling Berpengaruh di Indonesia* yang ditulis oleh Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza. Pada masa kepemimpinan Menteri Agama KH. Wahid Hasyim, Abu Bakar Aceh bekerja di Departemen Agama, membantu menteri dalam urusan penataan pelayanan haji. Selanjutnya, dipercaya oleh Kiai Wahid memimpin jamaah haji ke Mekah pada 1953. Karena keluasan ilmu dan kacakapannya dalam tulis-menulis, ia dipercaya mengomandani bidang publikasi Departemen Agama, sebelum kemudian menjadi staf ahli Menteri Agama. Setelah Pemilu 1955, ia yang dikenal tawadlu dan tidak suka menonjolkan diri itu masuk menjadi anggota Konstituante mewakili Partai NU. Setelah Kiai Wahid wafat pada 18 April 1953, Abu Bakar Aceh langsung mengambil inisiatif untuk menulis biografi dan pemikiran Kiai Wahid, sebagai penghormatan kepada tokoh NU itu. Empat tahun kemudian, buku itu terbit di Jakarta (kini sudah dicetak ulang pada 2011 oleh Panitia 1 Abad KH Wahid Hasyim). Pengalamannya dalam menulis buku tentang Kiai Wahid ini dimulai pada waktu Menteri Agama KH Masjkur, pengganti Kiai Wahid, menggelar acara peringatan setahun wafatnya Kiai Wahid dengan menyerahkan lukisan tentang Kiai Wahid kepada Nyonya Solehah, sang isteri dan juga ibu Abdurrahman Wahid. Kemudian dibentuklah panitia peringatan, yang salah satunya berbentuk penerbitan biografi dia. Dan Abu Bakar, selaku Kepala bagian Penerbitan Kementerian Agama, ditunjuk sebagai penulis. Abu Bakar dikenal tekun menggarap penulisan biografi tersebut. Ia bekerja siang dan malam, menghubungi para keluarga Kiai Wahid, hingga mengumpulkan foto-foto dan tulisan-tulisan yang pernah dimuat media. Salah seorang yang dihubungi untuk memperkaya bahan-bahan tersebut Kiai Abdul Karim Hasyim (dikenal Akarhanaf), adik Kiai Wahid. Setelah setahun mengumpulkan semuanya, ia mulai menulis, hingga menjadi buku seperti sekarang “Riwayat Hidup K.H. A. Wahid Hasyim dan Karangannya Tersiar”. Buku ini menunjukkan keluasan dan kedalaman pengetahuan Abu Bakar tentang pesantren dan dunia ulama. Kedekatan dan keakrabannya dengan kalangan reformis-modernis selama di Yogyakarta, tidak menghalanginya juga untuk membangun suasana harmonis dengan komunitas pesantren. Dalam sejumlah tulisannya, Abu Bakar menunjukkan kekagumannya dan bahkan menimba banyak dari tradisi keilmuan pesantren. Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Aboebakar_Atjeh Diakses pada 13 Agustus 2018.

Islam, dan yang terpenting lagi adalah beliau merupakan salah satu tim yang disusun sesuai peraturan Menteri Agama (PMA) NO. 4 Tahun 1954 tentang panitia penyusun riwayat hidup dan karangan tersiar K.H. A. Wahid Hasyim, dengan demikian, layak jika buku tersebut menjadi dokumen primer dalam penelitian ini. Selain itu, Atjeh juga hidup semasa dengan Wahid Hasyim sebagai bidang penerbitan era menteri agama RIS Wahid Hasyim. Beberapa tulisan sejarah dari berbagai penulis yang mendeskripsikan khususnya mengenai kiprahnya dalam proses politik pendidikan tinggi Islam. Selain itu, karya primer yang penting sesuai kajian ini adalah buku konteks dan kerangka konseptual politik pendidikan yang ditulis oleh M. Sirozi serta beberapa buku yang relevan tentang fokus kajian ini.

Sedangkan sumber sekunder adalah karya-karya dan tulisan-tulisan yang relevan dan mendukung kajian ini, hal ini dari beberapa buku rujukan yang penting dan mutakhir, serta di akui secara ilmiah, salah satunya adalah pada karya Azumardi Azra dan Saiful Umam tentang Menteri-Menteri Agama Biografi Sosial Politik dan beberapa penelitian lain yang relevan. Serta buku-buku tentang politik pendidikan dan hasil penelitian serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian penulis. Penelitian ini, termasuk jenis penelitian kualitatif, karena dari suatu peristiwa sejarah dari penganut metode kualitatif adalah totalitas atau *gestalt*, ketepatan interpretasi bergantung pada ketajaman analisis, objektivitas, sistematik dan sistemik dan benar dalam

interpretasinya.⁸⁵ Sehingga pada penelitian ini, merupakan penelitian sejarah dengan mengkaji proses transformasi Fakultas Agama UII menjadi PTAIN di era Menteri Agama K.H. A.Wahid Hasyim.

4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini bersifat kepustakaan dengan mengumpulkan dokumen terkait yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan tingginya, strategi, rencana dan dampaknya. Suharsimi mendefinisikan bahwa, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal variabel yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.⁸⁶ Dokumenter adalah informasi yang disimpan atau didokumentasikan sebagai bahan dokumenter, bahan dokumenter antarlain, (a) Otobiografi, (b) Surat-surat pribadi, (c) Kliping, (d) Dokumen Pemerintah maupun swasta, (e) Cerita Roman dan cerita rakyat, (f) Data *diserver* dan *flashdisk*, (g) data tersimpan di *Wib site*, dll.⁸⁷ Yang jelas dokumen adalah segala macam yang mengandung informasi baik di tulis maupun di cetak.⁸⁸

Penyusunan data dengan menggunakan bibliografi fungsional adalah menyusun, mengedit dan mengklasifikasi data sesuai fungsinya untuk masing-masing permasalahan. Sementara yang dimaksud bibliografi final adalah memilih, mereduksi, dan menyajikan data sesuai karakteristik

⁸⁵ Amirul Hadi dan Haryono, “*Metodologi Penelitian Pendidikan*”, Ibid, hal. 14.

⁸⁶ Suharsimi Arikunto., “*Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*” , Ibid, hal. 274.

⁸⁷ Burhan Bungin., “*Penelitian Kualitatif*” , Ibid, hal. 125.

⁸⁸ Wina Sanjaya., “*Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur*” ,Ibid, hal. 116.

permasalahan, hingga terkumpul dan secara final. Data dokumen terutama merupakan sumber yang bagus untuk studi kasus kualitatif karena mereka bisa mengadakan penyelidikan dalam konteks masalah yang diselidiki.⁸⁹

Pemahaman penulis mengenai penguatan transformasi fakultas agama UII ke PTAIN Menteri Agama Wahid Hasyim dalam proses formulasi kebijakan tersebut bersifat politis. Forwad menyatakan “setiap analisis serius mengenai pertanyaan tentang kebijakan umum dengan cepat meluas menjadi pembahasan tentang politik pada umumnya dan masyarakat secara keseluruhan”⁹⁰ M. Sirozi juga menambahkan bahwa kajian politik pendidikan bukan merupakan kajian konsep pendidikan Islam, atau kebijakan pendidikan Islam atau pada ideologis pendidikan Islam, bahkan bukan pula kajian ini merupakan kajian politik Islam, tapi yang benar adalah kajian tentang proses politik⁹¹ dalam penguatan pendidikan tinggi Islam di era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam transformasi Fakultas UII ke PTAIN pada tahun 1949-1952 di Indonesia. Komunikasi dan konsolidasi di era Menteri Agama RIS Wahid Hasyim dan Menteri Agama RI Faqih Usman telah meyakinkan kepada rezim dalam memberikan pertimbangan kebijakan tentang urgensi pendidikan tinggi Islam Negeri di bawah Kementerian Agama saat itu.

⁸⁹ Lihat Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, mengutip dari Merriam . hal. 99

⁹⁰ Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, mengutip dari Forward (1974) yang juga dikutip dalam Davis, warshurt dan Weller 1993, halm 8. Ibid. hal. 8.

⁹¹ Lihat Disertasi M. Sirozi. Ibid. hal. 8.

Selain itu, salah satu cara pengumpulan datanya yakni melakukan wawancara dengan responden primer dan atau sekunder pada fokus kajian penelitian ini. Responden pada penelitian ini terdiri dari beberapa zona, zona pertama di Kota Jombang Jawa Timur, respondennya antarlain pertama, Dr. K.H. Salahuddin Wahid (Putera K.H. A. Wahid Hasyim) sekaligus pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Kedua, Ust Zainal Arifin sebagai Kapala perpustakaan Pondok Pesantren Tebu Ireng. Ketiga, Ahmad Fauzan sebagai Direktur Pustaka Tebu Ireng. Zona kedua yakni di kota Palembang, wawancara dengan pakar ahli kajian politik pendidikan yakni M. Sirozi yang memungkinkan sangat jarang sumber daya manusia di Nusantara. di zona ketiga adalah di Jakarta, yakni wawancara dengan bagian Kementerian Agama, pertam wawancara dengan Bapak. Nur Indra (Biro HDI Kemenag RI) di Kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta, Kedua wawancara dengan Ibu Hariyah, Kepala Bagian Perpustakaan Litbang Kementerian Agama RI Jakarta. Ketiga wawancara dengan Bapak. Rasyid (Bagian Data Keagamaan) di Kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta. Keempat wawancara dengan Bapak Ajis, beliau adalah petugas lama di pengarsipan Kementarian Agama pusat Jakarta. dan kelima juga wawancara dengan Ibu Siska beliau adalah Kepala Bagian Biro Hukum Perundang-undangan Kementerian Agama RI Jakarta. Serta wawancara dengan Ibu Yeri (Kepala Bagian Buku-Buku Lama) di Perpustakaan Nasional RI Jakarta. Selain itu juga pengumpulan dokumen dari kota Yogyakarta baik di UII dan di UIN Sunan Kalijaga.

5. Analisis Data

Kajian ini dirancang untuk memberikan uraian analisis deskriptif dengan memaparkan fakta-fakta sejarah apa adanya tetapi berangkat dari kajian sejarah yang sudah ada sebelumnya serta atas urutan sejarah di era Menteri Agama Wahid Hasyim dalam Mentransformasi pendidikan Tinggi Islam di Indonesia, Juga akan dijelaskan pola hubungan antara kementerian agama RIS Era Wahid Hasyim dengan era menteri RI agama Fakih Usman, sampai pada proses ratifikasi peraturan pemerintah No. 34 Tahun 1950, karena hal tersebut adalah bagian representasi kebijakan dalam pengembangan pendidikan tinggi Islam dengan transformasi Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) menjadi PTAIN di Yogyakarta. Dikatan dengan cara lebih sederhana, kajian ini mencakup usaha untuk mengembangkan laporan historis politis mengenai bagaimana ide itu muncul di era Menteri Agama Wahid Hasyim, bagaimana pengaruhnya interest groups dalam proses politiknya, serta bagaimana interaksinya antar kelompok kepentingan Menteri Agama era Wahid Hasyim dengan Menteri Agama RI Faqih Usman, kemudian juga menjelaskan lebih siapa yang mendukung dan menolak proses tersebut.

Perhatian Kajian ini bukan merupakan suatu penerapan peraturan pemerintah tentang peraturan pemerintah, melainkan kajian politik pendidikan

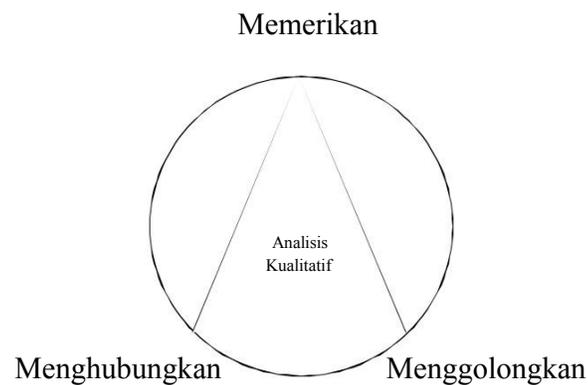
ini lebih pada kajian proses kebijakan itu dirumuskan,⁹² bagaimana sesungguhnya kebijakan di buat, yakni tindakan apa yang dilakukan berbagai pelakunya.⁹³ Kajian ini juga dirancang untuk menggambarkan dan menganalisis ranah dan proses pembentukan kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia, menjajaki keterkaitan nilai, kepentingan dan sumber daya manusia di era Menteri Agama Wahid Hasyim. Dan kajian ini juga bisa dijelaskan sebagai kajian isi kebijakan karena kajian ini berfokus pada preferensi kepentingan era Menteri Agama Wahid Hasyim. Selain itu kajian ini juga dijelaskan suatu analisis advokasi (pembelaan) proses.

Adapun analisis data pada penelitian ini dengan analisis historis yang bersifat politis di era Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim, maka analisis data dilakukan dengan beberapa tahap, *pertama*, mengklasifikasikan data tentang munculnya program penguatan pendidikan tinggi Islam era Menteri Agama Wahid Hasyim, sehingga diketahui mana proses yang lebih tepat dalam sejarah. *Kedua*, menginterpretasikan informasi yang ada, baik dalam pola interaksi politik pendidikan era Menteri Agama Wahid Hasyim. *Ketiga*, melakukan analisis, yakni implikasinya atas serangkaian tentang Proses interaksi politik pendidikan Tinggi era Menteri Agama Wahid Hasyim yang relevan di era kontemporer.

⁹² Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia, tentang *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*. hal.7.

⁹³ Lihat Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia yang mengutip dari (Hoogwood & Gunn, 1990, hlm. 27). Ibid, hal.7.

Secara teknis, analisis data “adalah proses menguraikan data menjadi komponen-komponen yang membentuknya, untuk mengungkapkan struktur dan unsur khasnya. Dalam kajian ini, lebih analisisnya adalah kepada proses formulasi pendidikan tinggi Islam dalam aspek proses munculnya ide gagasan transformasi, pengaruh kelompok elit dalam transformasi dan interaksi antar kelompok dalam proses politik tersebut. Sehingga menjadi penting bahwa untuk memberikan satu pola analisis pada kajian ini. Analisis memusatkan perhatian makna pada pemahaman dan pengertian mereka akan keterlibatan mereka. Semua data yang relevan di analisis dan disampaikan dengan kata atau gambar. Oleh sebab itu analisis ini bersifat kualitatif. Ini mengikuti proses melingkar, seperti yang disampaikan Dey,⁹⁴ dengan melibatkan proses memerikan, menggolongkan dan menghubungkan seperti di bawah ini,



Gambar 1. Analisis kualitatif sebagai proses melingkar
(Dey 1993, hlm.31)

⁹⁴ Lihat Dey, “ *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly guide for social scientist*. Routledge, London and Newyork, 1993, hal.30-31. Lihat juga Disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia yang mengutip dari Dey. Ibid, hal.111.

Langkah “memerikan” dalam proses melingkar ini mencakup laporan yang tuntas dan komprehensif mengenai konteks, proses keterlibatan di Era Menteri Agama Wahid Hasyim dalam proses transformasi Fakultas Agama UII ke PTAIN. Ketiga aspek di atas tidak dinyatakan dengan sesederhana mungkin, melainkan dengan semaksimal mungkin yang mencakup informasi deskriptif tentang konteks kegiatan, niat, tujuan, strategi, cara yang mengatur dari era Menteri Agama Wahid Hasyim serta dampak dari prosesnya tersebut. Konteks ditempatkan untuk menempatkan kegiatan dan menjangkau latar sosial tempat kegiatan terjadi dan waktu terjadinya. Di era Menteri Agama Wahid Hasyim dipakai untuk menjelaskan bagaimana mereka merumuskan situasinya, dan apa motivasinya yang menggerakkan kegiatan tersebut, sejauhmana proses kegiatannya dan apa tujuannya serta bagaimana cara mereka berinteraksi untuk mempertahankan atau mengubah kegiatan/ programnya.

Langkah menggolongkan dalam siklus ini adalah proses konseptual yang dipakai untuk menilai karakteristik data dan kemudian memasukkannya ke dalam berbagai data. Dan untuk dapat fokus pada analisis diperoleh dengan beberapa sumber, kesimpulan dari data, pertanyaan penelitian, substansi, kebijakan dan masalah teoritik dan imajinasi, intuisi dan pengetahuan sebelumnya.⁹⁵ Kemudian langkah akhirnya adalah menghubungkan,

⁹⁵ Lihat Dey, “ *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly guide for social scientist*. Routledge, London and Newyork, yang dikutip dalam disertasi M. Sirozi di Monast University, Australia Ibid, hal.111

dilakukan dengan memeriksa penyimpangan atau sesuatu yang kurang sesuai, ragam, dan kejanggalan di dalam data lalu semuanya dikumpulkan bersama.

Ketiga langkah ini bersifat deskriptif dan interpretatif, semuanya dimaksudkan untuk memberikan pemerian analitik tentang data yang relevan bagi proses perumusan kebijakan pendidikan tinggi Islam di Indonesia. Pemaparan data di atas sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberikan kemungkinan memberikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.⁹⁶ Hal ini penting dilakukan untuk meingkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan analisis dan pemahaman sajian data peneliti. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.⁹⁷ Sehingga dengan langkah tersebut penting disusunnya laporan dari substansi kajian ini yang memungkinkan menghasilkan teori yang bisa digunakan di era kontomprer dengan tetap berdasarkan sejarah dan pengembangan tersebut.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih tersetruktur dan mempermudah peneliti dalam pembahasannya, maka peneliti menyusun sistematika sebagai berikut: Bab Pertama terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah,

⁹⁶ Menurut Miles & Huberman., dikutip oleh Imam Gunawan., “ *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*”, hal. 211.

⁹⁷ Sugiyono., “ *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, hal. 341.

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas tentang pengertian politik pendidikan Islam, relasi politik dan pendidikan Islam, pendekatan dan asumsi dasar kajian politik pendidikan Islam, tujuan dan manfaat kajian politik pendidikan Islam, ruang lingkup kajian politik pendidikan Islam, potret metodologis kajian politik pendidikan Islam, teori *interest groups*, transformasi pendidikan Islam, pengertian transformasi pendidikan Islam, faktor munculnya transformasi pendidikan Islam di Indonesia, serta akar sejarah penguatan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

Bab ketiga membahas faktor-faktor munculnya program politik penguatan Institusi Pendidikan Tinggi Islam Di Indonesia Era Menteri Agama K.H. A. Wahid Hasyim, antarlain menjelaskan terdapat dua faktor penting, pertama faktor personal Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim, dan faktor sosio-politik di era Menteri Agama K.H.A. Wahid Hasyim, Faktor personalnya terdiri dari adanya trah karebet, kuatnya motif intrinsik, perhatian *All Out* terhadap pendidikan, tingginya spirit praksis politik, luasnya pengetahuan, kuatnya jiwa nasionalisme, piawai dalam berorganisasi, dan memiliki kecenderungan paradigma pendidikan alternatif, cakap dan dapat diterima oleh semua *groups*. Sedangkan faktor sosio-politiknya terdiri dari faktor sosiologis, faktor pengaruh partisipasi rezim, faktor politik. Selain

itu juga pada bab ini juga dibahas pengaruh dan keterlibatan tokoh-tokoh lain yang relevan dengan fokus kajian ini.

Bab keempat, membahas pola interaksi sosio-politik era menteri agama K.H. A. Wahid Hasyim dalam penguatan institusi pendidikan tinggi islam di indonesia, pertama pola interaksi assosiatif-kooperatif, pola interaksi assosiatif-akomodatif, dan pola interaksi disasosiatif-kompetitif. Bab kelima, merupakan bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan, implikasi, saran dan rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arifin, Ahmad. (2009). *Politik Pendidikan Islam Menelusuri Ideologi dan Aktualisasi Pendidikan Islam di Tengah Arus Globalisasi*. Yogyakarta: Teras.
- Assegaf, Abd. Rachman. (2005). *Politik Pendidikan Nasional: Pergeseran Kebijakan Pendidikan Agama Islam dari Praproklamasi ke Reformasi*. Jogjakarta: Kurnia Kalam.
- Achmadi. (2008). *Ideologi Pendidikan Islam Paradigma Humanisme Teosentris*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Amnur, Ali Mahmudi. (2007). *Konfigurasi Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Pustaka Fahima.
- Anwar, Rosihan. (2003). *Ulama Dalam Penyebaran Pendidikan dan Khazanah Keagamaan*. Jakarta: PT. Pringgondani Berseri.
- Arifin, Imron. (1992). *Kepemimpinan Kyai Kasus Pondok Pesantren Tebu Ireng* Yogyakarta: Kalimsahada Press.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). “ *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktik*” , Jakarta: Rineka Cipta.
- Asy’ari , Hasyim. (2017). *Adabul ‘Alim wa al-Muta’allim*. Tangerang: Tsamart.
- Atjeh, H. Abubakar. (1957). *Sejarah Hidup K.H. Abdul Wahid Hasjim dan Karangan Tersiar*. Jakarta: Panitia Buku Peringatan Alm. K.H. A. Wahid Hasyim.
- . (2015). *Sejarah Hidup K.H. Abdul Wahid Hasjim*. Jombang: Tebu Ireng.
- Azizy, A. Qodri A. (2002). *Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika Sosial*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Azra dan Umam. (1998). *Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik*. Jakarta: INIS dan PPIM Depag RI.

- Azra, Azyumardi (2012). *Pendidikan Islam; Tradisi dan Modernisasi di Tengah Tantangan Millenium III*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Bakker dan Zubair. (1994). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Barton, Greg. (2016). *The Authorized Biography Of Abdurrahman Wahid*. Terj. Lie Hua. Equinox Publishing. Yogyakarta: Saufa.
- Basori. Ruchman. (2006). *The Founding Father Pesantren Modern Indonesia Jejak Langkah K.H. Abdul Wahid Hasyim*. Jakarta: iN eis.
- Baso, Ahmad. (2013). *Pesantres Studies 2a Buku II: Kosmopolitanisme Peradaban Kaum Santri di masa Kolonial*. Jakarta : Pustaka Afid Jakarta. \
- Benda, Harry J. (1957). “ *The Crescent and The Rising Sun, Indonesian Islam under the Japanese Occupation 1942-1945*. terj. Den Haag: The Univesity Of Rochester.
- B.J. Boland. (1985). *The Strunggle Of Islam In Modern Indonesia*. Trj. Jakarta: PT. Grafitri Pers.
- Buchori, Muchtar. (1995). *Transformasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Budairy dan Zawawi. (2009). *Dari Pesantren untuk Bangsa; Birografi K.H. Muhammad Ilyas*. Jakarta: Yayasan Saifuddin Zuhri.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Chaer, Moh. Toriqul. (2011). *K.H Wahid Hasyim dan Rekontruksi Paradigma Pesantren*, Semarang: Universitas Wahid Hasyim.
- Chasbullah, K.H. Wahab. (2015). *Kaidah berpolitik dan Bernegara* Depok: Langgar Swadaya Nusantara.
- Cresswell, John W. (2010). *Reseach Design” Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Thir Edition*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denny JA. (2006). *Melewati Perubahan, Sebuah catatan atas Transisi Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: LkiS.
- Depdikbud. (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewanto, Nugroho. (2017). *Wahid Hasyim untuk Republik dari Tebuireng*. Seri Buku Saku Tempo: Tokoh Islam di awal kemerdekaan. Jakarta: Gramedia.

- (2011). *Wahid Hasyim untuk Republic dari Tebuireng*. Jakarta: Tempo.
- Dey. (1993). *Qualitative Data Analysis: A User-Friendly guide for social scientist*. London and Newyork. Routledge.
- Dhofier, Zamakhsyari. (2011). *Tradisi Pesantren : Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Djainuri, Ahmad. (2001). *Education and Modernization In Midle East*. Terj. Surabaya: Al Ikhlas.
- Elly M. Setiadi (dkk), (2016). "*Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*", Prenada Media Group. Jakarta.
- Fananie, Zainuddin. (1934). *Pedoman Pendidikan Modern*. Jakarta: PT. Arya Surya Perdana.
- Fatah, Nanang. (2006). *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Fischer, Frank dkk. (2014). "*Handkbook Analisis Kebijakan Publik, Teori, Politik dan Metode*". Bandung. Nusa Media.
- Freire, Paulo. (2016). *Sekolah kapitalisme yang licik*. Yogyakarta, IRCiSoD-LKiS.
- (2007). *The Politic o Education: Culture, Power, and Liberation*", Yogyakarta: READ.
- (2004) *Menggugat Pendidikan, Fundamentalis, Konservatif, Liberal Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Geert, Clifford. (1983). *The Religion Of Java*. Terj. Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya
- George R. Terry. (2013). *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Gumiandari, Septi. (1999). *Transformasi Pesan Santri Vis-a-Vis Hegemoni Modernitas*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Gunawan, Heri. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Alfabeta.

- Gunawan, Imam. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Metode*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadi dan Haryono. (1998). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Haedari et. Al, (2006). *Masa Depan Pesantren dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Komplexitas Global*. Jakarta: IRD Press.
- Haqqi, Afif Rizqon. (2011). *Revitalisasi Humanisme Religius dan kebnagsaan K.H.A. Wahid Hasyim*. Jombang: Pesantren Tebu Ireng.
- Harahap, Syahrin. (2014). *Metodologi Studi Tokoh & Penulisan Biografi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Helmy, Ario. (2015). *K.H. Zainul Arifin Pohan Panglima Santri Ikhlas Membangun Negeri*. Tangerang: Pustaka Compass.
- Hasyim, Wahid. (2011). *Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama (Kumpulan tulisan Wahid Hasyim dengan pengantar dari putranya Sholahuddin Wahid)*. Jakarta: Mizan.
- Heryanto dan Rumar. (2013). “*Komunikasi Politik Suatu Pengantar*”. Bogor. Ghalia Indonesia.
- Huda, Nor. (2015). *Sejarah Sosial Intelektual Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilham Sembiring, (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Irawan, Aguk. (2016). *Sang Mujtahid Islam Nusantara, Novel Biografi K.H. Abdul Wahid Hasyim*. Jakarta: Imania.
- Islamy, Irfan. (2014). *Prinsip-prinsip dalam perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Islamy, Irfan. (2014). *Prinsip-prinsip dalam perumusan kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- J. Mezirow, (2000). *Learning to think like an adult: Core concepts of Transformation Theory*, In J. Mezirow & Associates, *Learning as transformation*. San Francisco: Jossey-Bass.

- J.W. Schoorl. (1984). *Modernisasi pengantar sosiologi pembangunan Negara-Negara sedang berkembang*” terj.R.G. Soekadijo. Jakarta: PT. Gramedia.
- J.W. Schoorl, *Modernisasi pengantar sosiologi pembangunan Negara-Negara sedang berkembang*, terj.R.G. Soekadijo, PT. Gramedia, Jakarta, 1984.
- Jalaluddin. (2003). *Teologi Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- , (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Tela’ah sejarah dan Pemikirannya. Jakarta: Kalam Mulia.
- Khaldun, Ibnu. (2012). *Mukaddimah*. terj. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar.
- Khursid, Ahmad. (1983). *The Nature of the Islamic Resurgence*. John. L. Esposito (ed)., *Voices Os resurgent Islam*. New York: Oxford University Press.
- Kimbrough. (1964). *Political Power and Educational Decision Making*. Chicago: and McNally & Company.
- Kuntowijoyo. (1994). *Paradigma Islam Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan.
- , (2013). *Metodologi Sejarah edisi kedua*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- , (2017). *Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- , (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kafrawi, Muhammad (1959). “*Alamanak Djawatan Pendidikan Agama 1959*”, dicatat pada 31 Desember 1958. Jakarta: Shinta Jakarta.
- M. Echols dan Shadily. (2003). *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia.
- Margaret S Archer, (1985). *Educational Politics A Model for The Their Analysis*. Ian Mcani and Jenni Ozga, “Policy Making in Educati on. Great Britain: Pergamon Press.
- M. Sirozi. (2013). *Konteks dan kerangka konseptual Politik Pendidikan*. Palembang : Noer Fikri Offset.
- , (2010). *Politik Pendidikan dinamika hubungan antara kepentingan kekuasaan dan praktik penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Madjid, Nurcholish (1997). *Bilik-Bilik Pesantren*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Mahfud, Choirul. (2016). *Politik Pendidikan Islam analisis kebijakan pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mahmud, Marzuki. (2012) *Manajemen Mutu Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mandan, Arief Mudatsir. (2008). *Napak Tilas pengabdian Idham Chalid (Tanggung Jawab Politik NU dalam Sejarah)*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu.
- Martono, Nanang. (2014). “*Sosiologi Pendidikan Michel Foucault, pengetahuan, kekuasaan, disiplin, hukuman dan seksualitas*” , Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Maryamah, Heny, “ *Politic of Education; The Inclusion of Islamic Educational Institutions in the National Education System Law 20/2003*”, dalam Jurnal Pesantren, (Vol 2 No. 2, 2010),
- Mastuhu (1999). *Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu,
- Mastukki, HS. (1997). *Perguruan Tinggi Islam di Indonesia 1945-1975. (Sejarah dan Peranannya)*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah.
- , (2010). “*Kebangkitan Kelas Menengah Santri: Dari Tradisionisme, Liberalisme, Post-Tradisionisme, hingga Fundamentalisme*”, Pustaka Dunia, Banten.
- , (2004). *Sinergi Madrasah dan Pondok Pesantren (Suatu Konsep Pengembangan Madrasah)*, Jakarta, DEPAG RI.
- Miftah, Toha. (2014). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya .,* Jakarta: Rajawali Pers.
- Miftahudin. (2017). *K.H. Hasyim Asy'ari Membangun, Membela dan Menegakkan Indonesia*. Bandung: Marja.
- Misrawi, Zuhairi. (2013). *Hadratussyaikh Hasyim Asy'ari Moderasi, Keumatan dan kebangsaan*. Jakarta. Buku Kompas.
- M. Natsir. (1973). *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan Bintang.

- Mortimer. Rex. (2011). *Indonesian Communism Under Soekarno Ideologi dan Politik 1959-1965*. Terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mudjia Rahardjo. (2010). *Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer*. Malang: UIN-MALIK PRESS.
- Mukani. (2015). *Biografi dan Nasihat Hadratussyaikh K.H. M. Hasyim Asy'ari sebagai salah satu ulama terkemuka penyebar ajaran Islam nusantara*. Jombang: Pustaka Tebu Ireng.
- (2016). *Berguru Ke Sang Kiai Pemikiran Pendidikan K.H. M. Hasyim Asy'ari*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Nana, Sukamadinata. (2005). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Adham. (1983). *Sosiologi*. Bandung: Alumni.
- Nata, Abudin. (2001). *Tokoh-Tokoh Pemikir Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- (2014). *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- (2012). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Prenada Media Group.
- (2001). *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Lembaga-Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- (2003). *Manajemen Pendidikan mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Nawawi dan Hadari. (2004). *Kepemimpinan yang efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada Press.
- (1996) *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- NL gage & David C Berliner. (1984). *Educational Psychology. Third Edition* Boston: Hough Miffin Company.
- Noer, Deliar. (1987). *Partai Islam di Pentasi Nasional 1945-1965*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- (1983). *Administrasi Islam Di Indonesia Edisi Baru*. Jakarta: CV. Rajawali Pers.

- Nuryanto, M.Agus. (2008). *Mazhab Pendidikan Kritik*, Menyingkap Relasi Pengetahuan, Politik, dan Kekuasaan. Yogyakarta: CV. Langit Aksara.
- Nurhayati, Djamas. (2009). *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia pasca kemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- PB NU. (1999). Hasil-hasil Muktamar *Nahdlatul 'Ulamā'* . Jakarta: Sekretariat Jenderal Pengurus Besar *Nahdlatul 'Ulamā'* .
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008
- Poerwadarminta, WJS. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.
- Prawirosentono & Primasari. (2014). *Manajemen Strategik & Pengambilan keputusan Korporasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Putra, Galih R.N, (2016). *Liberalisasi Pendidikan Tinggi di Indonesia dan India*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Qomar, Mujamil. (2005). *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Isntitusi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, Arif. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Surabaya: Laksbang Mediatama Yogyakarta.
- Rahmatia. (2002). *Perubahan Sosial: Sketsa Teori dan Refleksi Metodologi Kasus Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ramlan, Surbakti. (1992). *Memahami ilmu politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ritaudin, M. Sidi. (2013). *Khazanah Profetika Politik*. Bandar Lampung: Harakindo Publishing.
- Rohaniah dan Efriza. (2017). *Handbook Sistem Politik Indonesia*. Malang: Intrans Publishing.
- Resta Nurcahyaningih, (2014). *“Pola Interaksi Sosial Masyarakat Urban Di Desa Tanggulangin Kab. Kebumen (Studi Kasus Tentang Interaksi Sosial Masyarakat Urban Desa Tanggulangin, Kab. Kebumen)”* . Yogyakarta. UIN Sunan Kalijaga.
- Ruslan, Rosady. (2014). *Manajemen Public Relations & Media Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sanjaya, Wina. (2013) *Metode Penelitian Pendidikan; Jenis, Metode dan Prosedur* . Jakarta: Prenada Media Group.
- Sembiring, Ilham. (2010). *Pengantar Teori-Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Setiadi dan Kolip, (2011). “*Pengantar Sosiologi, Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahannya Sosial; Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*”. Jakarta: Prenada Media Group.
- Shofiyullah. (2011). *KH.A. Wahid Hasyim Sejarah, Pemikiran dan Baktinya bagi Agama dan Bangsa*. Yogyakarta: Pesantren Tebu Ireng.
- Soebagijo LN. (1982). *K.H. Masjkur Sebuah Biografi*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Soekanto, Soryono. (1997). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stanton, Charles Michael. (1994). *Perguruan Tinggi Dalam Islam*. trj. Jakarta: Logos.
- Sudarwan Danim, Suparno, (2009). *Manajemen dan Kepemimpinan Transformasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2003). *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih (2010). *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sumanto. (1995). *Metodologi Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Suprayogo dan Sumianto (2008)., “ *Perubahan Pendidikan Tinggi Islam*”, *Refleksi Perubahan IAIN/ STAIN Menjadi UIN*. Malang: UIN Malang Press.
- Supriyadi. (2015). *Ulama Pendiri, Penggerak, dan Intelektual NU dari Jombang*. Jombang: Pustaka Tebu Ireng.
- Surya Brata, Sumadi. (1987). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.

Suryanegara, Ahmad Mansur. (2016). *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santridalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid kesatu*. Bandung: Surya Dinasti.

----- (2016). *Api Sejarah, Mahakarya Perjuangan Ulama dan Santridalam menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid kedua*. Bandung: Surya Dinasti.

Sutikno, M. Sobry. (2012). *Manajemen Pendidikan*. Lombok: Holistica.

Suwarsono, Alvin Y. So, (1991). *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia: Teori-teori Modernisasi, Dependensi dan Sistem Dunia*, Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial.

Syafaruddin. (2008). *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syafi'i, Inu Kencana. (2010). *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Syukur, H. Fatah. (2011). *Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Suharto, Toto. (2011). *Filsafat Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar Ruzz.

Sukardi, Ismail. (2014). *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Keresidenan Palembang, 1925-1942*. Yogyakarta: CV. Idea Sejahtera.

Syahrial, Syarbaini Rusdiyanta. (2013). *Dasar - Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Tafsir, Ahmad. (2005). *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Wahid, Abdurrahman. (1999). *Pondok Pesantren Masa Depan*. Bandung: Pustaka Hidayah.

----- (2007). *Menggerakkan Tradisi: esai-esai Pesantren* . Yogyakarta : LKiS.

----- (1983) *Muslim Di tengah Pergumulan*. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional (Lappenas).

Yasin dan Karyadi. (2011). *Profil Pesantren Tebu Ireng*. Jombang: Pustaka Tebu Ireng.

Yunus, Mahmud. (1965). *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.

----- (1990). *Pendidikan Islam Dari Zaman Nabi SAW, Khlaifah-khalifah rasyidin, Bani Umaiyah dan Abbasiyah sampai saman mamluks dan Usmaniyah Turki*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Yusuf dkk. (2017). *Kaleidoskop Kementerian Agama Republik Indonesia 1946-2016, Jejak Langkah dari Masalalu*. Jakarta: Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi Balitbang dan Diklat Kementerian Agama.

Zainudin, A. Rahman. (1992). *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ziemek, Manfred. (1983). *Pesantren dalam Perubahan Sosial*. (diterjemahkan oleh Butche B. Soendjojo. Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).

Zuhri, Saifudin. (1987). *Berangkat dari Pesantren*, Jakarta: PT. Gunung Agung.

Zurinal Z dan Sayuti. (2006). *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

B. Majalah/ Surat Kabar / Laporan/ Pertelaan

Agama, Kementerian. (1950). *Konperensi Kementerian Departemen Djawatan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pertelaan Kementerian Agama. Jilid III dan IV.

Agama, Kementerian. (1950). *Konperensi Kementerian Departemen Djawatan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pertelaan Kementerian Agama. Jilid V.

Agama, Kementerian. (1951). *Konperensi Dinas ke II Kementerian Agama Jilid I Sidang Umum*. Jakarta: Pertelaan Kementerian Agama. Jilid I.

Agama, Kementerian. (1951). *Konperensi Kementerian Departemen Djawatan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Penyiaran Djawatan Penerangan Agama Pusat Bagian redaksi, Publikasi dan Penerbitan..

Agama, Kementerian. (1950). *Konperensi Kementerian Departemen Djawatan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pertelaan Kementerian Agama. Jilid VI-VII-VIII dan IX. Tammam.

- Agama, Kementerian. (1950). *Konperensi Kementerian Departemen Djawatan Agama Seluruh Indonesia*. Jakarta: Pertelaan Kementerian Agama. Jilid I dan II.
- Agama, Kementerian. (1953). *Konperensi Kementerian Agama*. Dilaksanakan di Sukabumi Tanggal 28 Desember 52-3 Januari 1953. Jakarta: Kementerian Agama Bagian Penerbitan.
- Asy'ari, Hasyim.. (2604). *Ketegoehan Iman*. Jakarta: *Majalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. No.5.Tahun ke-2. hal.2
- Abdoel Halim,. (2604). *Masyarakat Hidup dan Semangat Bekerja*. Jakarta: *Madjalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. No.3.hal.7
- Aly, Fachry. (1984). *Pasang Surut Peranan Politik Ulama Sebuah Kerangka Hipotesa Struktural*. Jakarta: *Majalah Prisma*. No.4 April 1984 Tahun XIII. Hal. 19.
- Dhofier, Zamaksyari. (1986). *Transformasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: *Majalah Prisma* No. (1).
- . (1983). *Lembaga Pendidikan Islam dalam Perspektif Nasional*. Jakarta: *Majalah Prisma*. No.9. September Tahun XII. Hal. 13.
- . (1983). *K.H. Hasyim Asy'ari, Penggalang Islam Tradisional*. Jakarta: *Majalah Prisma*. No.1. Januari 1984 Tahun XIII. Hal. 74.
- . (1984). *K.H. Wahid Hasyim, Rantai Penghubung peradaban Pesantren dengan Peradaban Indonesia Modern*. Jakarta: *Majalah Prisma*. No.8.Tahun 1984. Hal. 73.
- Gunseikan. (2604). *P.T. Gunseikan-Kakka dalam sidang para kepala-kepala Madrasah*. Jakarta: *Majalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. No.3.hal.3
- Hasyim, A. Wahid. (2604). *Islam Agama Fitrah*. Jakarta: *Majalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. No.7.Tahun ke-2. hal.3
- . (2604). *Melenyapkan yang Kolot*. Jakarta: *Majalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. 1 Juni 2604 Tahun ke-11. hal.2.
- . (2604). *Kebangkitan Dunia Islam*. Jakarta: *Majalah Islam Soera Moeslimin Indonesia*. No.16.Tahun ke-11.
- . (1950). *Pendidikan Ketuhanan*. *Mimbar Agama*, *Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama* Jilid I.No.56. Jakarta. Kementerian Agama. hal.9.

- (1950). *Perbaikan Perjalanan Haji*. Mimbar Agama. Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid 2. No.56. Jakarta. Kementerian Agama. hal.4.
- (1950). *Maklumat Kementerian Agama Republik Indonesia Serikat*. Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid 2.No.56. Jakarta. Kementerian Agama. hal.48.
- (1950). *Kedudukan Ulama dalam Masyarakat Islam di Indonesia*. Majalah Resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid 2. Jakarta. Kementerian Agama. Hal.78.
- "Latihan Lapar untuk Kebahagiaan Hidup dan Perdamaian Dunia" Djakarta: Penjiaran kementerian Agama, 1950. P.5.
- (2011) " Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama' " Bandung: PT. Mizan Pustaka.
- H.A. Salim. (1950). *Kementerian Agama dalam Republik Indonesia*. Mimbar Agama, Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid 2.No.2 Tahun ke I. Jakarta: Kementerian Agama. hal.5.
- Hatta, Mohammad. (2004). *Kemenangan, Kemerdekaan dan Kemerdekaan (Trilogi)* Jakarta: Majalah Islam Soeara Moeslimin Indonesia. No.20.Tahun ke-11. hal.6
- Hoesia, Oemar Amin. (1954). *Pergolakan Umat Islam Menurut Pandangan Sarjana-sarjana barat Persoalan Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.17.hal. 19.
- Kafrawi, R. Mohd. (1950). *Pengumuman Pemerintah tentang Persetujuan Pembentukan Kementerian Agama Kesatuan*. Mimbar Agama, Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid I.No.56. Jakarta. Sekjend Kementerian Agama RIS. hal.44.
- Ki Suratman. (1983). *Dunia Pendidikan Kita Gelap*. Jakarta: Majalah Prisma. No.9. September Tahun XII. Hal. 43.
- Mahfud MD Dkk. (1994). *Setengah Abad UII Sejarah Perkembangan Universitas Islam Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Maimunah. (2013). *Relasi Politik pendidikan dan politik kekuasaan*. Ibid. Jurnal Al-Afkar, Vol. II, No.II, Oktober
- Nasaruddin Z. *Untuk apa PTAI Negeri dan SGHA Negeri?*. Majalah Hikmah Mingguan Islam Populer. No. 51 Tahun 1953.
- Purwanto, Nurtano Agus. *Pengaruh Politik dalam bidang Pendidikan*", Jurnal

Manajemen Pendidikan, No. 02/Th IV/Oktober/2008.

- Prawiranegara, Syafruddin. (1950). *Kedudukan dan Kemenangan Islam Menurut Sejarah*. Majalah Bintang No.5 Tahun 1. Jakarta.hal.52.
- Prawiranegara, Syafruddin. (1950). *Islam Merupakan Kompromis antara Komunisme dan Kapitalisme*. Mimbar Agama, Majalah resmi yang terbit berkala dari Kementerian Agama Jilid I.No.56. Jakarta. Kementeria Agama..hal.13.
- Puslitbang *Kehidupan Beragama dan Penelitian dan Pengembangan Agama. (1980/1981). Laporan Sejarah Departemen Agama Naskah Tahap 1 sejak menteri H.M. Rasyidi hingga menteri Alamsyah ratu Perwiranagara*. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI.
- Puslitbang *Kehidupan Beragama Badan Litbang Agama. (1983/1984). Laporan Penulisan Sejarah Departemen Agama Naskah Tahap IV*. Jakarta: Proyek Penelitian Keagamaan Departemen Agama RI.
- Rusydiyah, Evi Fatimatur. (2017). *Analisis Historis Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa K.H.A.Wahid Hasyim*. Jurnal Al-Ibroh. Surabaya: Sunan Ampel. Vol. 2 No. 1 (5).
- Saiful, Umam. *K.H. Imam Zarkasyi: Peletak Modernisasi pendidikan Pesantren*. dalam Jurnal Komunikasi Dunia Perguruan Madrasah, Vol 1 No. 3, 1997.
- Syaaf, A.M. (1951). *Pembentukan Kabinet dari Sartono Ke Sidik Sukiman*. Jakarta: Majalah Merdeka, Berita Mingguan Untuk Indonesia. TH. IV.No.18. hal.5.
- Syaaf,A.M. (1951). *Bagaimana Konsekuensi Pemerintah terhadap program kabinetnya?*. Jakarta: Majalah Merdeka, Berita Mingguan Untuk Indonesia. TH. III.No.50. hal.5.
- Syafii, Mohd. (1954). *Kedudukan Perguruan di tengah Masyarakat*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.17.hal. 5.
- Wahid, Abdurrahman. (1984). *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Dewasa Ini*. Jakarta: Majalah Prisma. No.4 April 1984 Tahun XIII. Hal. 31.
- Wibisono, Jusuf. (1954). *Islam dan Nasionalisme*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.17.hal. 13.
- (1954). *Ideologi Politik Masyumi*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.51. hal. 5.

Wathoni, Kharisul. (2013). *Pendekatan Sejarah Sosial Dalam Kajian Politik Pendidikan Islam*. Jurnal Tadrîs. Volume 8 Nomor 1 (6).

Yunus, Mahmud. (1954). *Menuju kearah Pendidikan yang Sempurna*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.16.hal. 16.

Zuhri, Saifuddin. (1984). *Kelemahan Uatama, Masalah Kepemimpinan*. Jakarta: Majalah Prisma. No.4 April 1984 Tahun XIII. Hal. 73.

Z. Arifin. (2604). *Roekoen Tetangga dalam Islam*. Jakarta: *Majalah Islam Soeara Moeslimin Indonesia*. No.5.Tahun ke-2. hal.7

Tidak tercatat Penulisnya, (1954). *Kerjasama antara Islam dan Nasional, siapa yang Menyebabkan Retaknya Kerjasama itu?*. Jakarta: Majalah Hikmah. No.17. hal. 5.

C. Disertasi/ Jurnal/ Penelitian/DII

Abror, Darul. "*Berpartisipasi dalam Memilih Pemimpin yang Ideal*", Khutbah Jum'at pada tanggal 22-06-2018 di Masjid Raya Nurul Iman Lubuk Seberuk Lempuing Jaya OKI.

----- 2015. "*Teori Motif Imbang*", Tugas Akhir Penelitian dalam Penyusun Teori pada Mata Kuliah (Teori dan Filsafat Pendidikan) yang di ampu oleh Prof Jalaludin pada semester satu program strata Tiga di UIN Raden Fatah Palembang dengan nilai 85 atau (A) dan sekarang dalam proses penerbitan pada Jurnal STAI As-Shiddiqiyah.

Azra, Azumardi. (1992) *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Disertasi. Newyork: Colombia University.

Baedowi, Ahmad. (2005). *Politik pendidikan atau pendidikan tak berpolitik?*. Jurnal penelitian pendidikan dan keagamaan. 3. (4).

Cahyono, Fendi Teguh, (2016). *Kebijakan Menteri Agama K. H. Wahid Hasyim Terhadap Kemajuan Pendidikan Islam Di Indonesia*. *Al Achyad* Jurnal Ilmu Keislaman. Mojokerto: IAI Uluwiyah Vol.1.No.1 (9)

Jalaludin. (1990). *Santi Asromo K.H. Abdul Halim: Studi Tentang Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Disertasi pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid. Jakarta: tidak diterbitkan.

Giri, Wide Priyambono., "*Nilai Budi Pekerti Dalam Cerbung Jaka Tingkir Karya a Ambarwati, Majalah Djaka Lodang Edisi 17 Sampai 25 Tahun 2012*"

Jurnal Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Universitas Muhammadiyah Purworejo., Vol. / 08 / No. 02 / Maret 2016, hal.58-65.

- Heni, Listiana. (2013). *Dinamika Politik Pendidikan Guru Agama Islam pada masa orde lama” dalam Jurnal Pendidikan Agama Islam , (Vol 2 No 2 November).*
- Khozin Af, Abdullah. (2012). *Konsep Kekuasaan Mitchel Foucoult.* Jurnalnya Teosofi: Jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam, Volume 2 Nomor 1 (6).
- M. Sirozi, “ *Politics of Educational Policy Production in Indonesia: A Case Study of the Roles of Muslim Leaders in the Establishment of the Number 2 Act of 1989*”. Disertasi (Australia: Monast University). 2 004
- M. Natsir. (1952). *Tuntutan Islam.* Jakarta: Hikmah Mingguan Islam Populer. No. 26 Tahun V. hal. 6
- Mudjiono, Yoyon. (2012). “ *Ilmu Komunikasi*”. e-Jurnal IAIN Sunan Ampel. Surabaya.
- Mukodi. *Pesantren Dan Pendidikan Politik di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik”* , Jurnal Al-Tahrir, Vol. 16, No. 2 November 2016.
- Muslim, Asrul. “ *Ashobiyah Ibn Khaldun: Konsep Perubahan Sosial Di Indonesia*” e. jurnal Sulasena. Jurusan Pendidikan Sosiologi. Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat UIN Alauddin. Makassar. Volume 7 Nomor 2 Tahun 2012
- Rahman, Arif “*Guru dalam Pusaran Kekuasaan, Potret Konspirasi dan Politisasi*”, Disertasi (Yogyakarta: Pasca UNY 2013)
- Saoki., *Islam dan Negara Menurut M. Ntasit dan Abdurrahman Wahid”* Al-Daulah, Vol. 4, No.2, Oktober 2014.
- Sholeh, Shonhadji, “*Pembaruan Wacana kaum Nahdliyin: Kajian Sosiologis tentang Perubahan dari Tradisionalisme ke Pos-Tradisionalisme*” *Disertasi, Surabaya: UNAIR, 2004,*
- Sriwahyuni, Tutik. (1996). *Peranan K.H. Wahid Hasyim dalam Perjuangan Politik Islam 1942-1945.* Penelitian IAIN Surabaya.
- Suyitno. (2007). *Matahari Terbit dan Bintang Sembilan: Studi terhadap Pemahaman Muhammadiyah-NU dan Implikasinya terhadap Identitas Politik Islam.* Disertasi pada Sekolah Pascasarjana (SPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Syahid Jakarta.

- Sunarso. (2007). *Pendidikan Politik dan Politik Pendidikan*. Jurnal Civic. Vol.4, No 2, (12).
- Sunarto, Ahmad Zein, (2012). *Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia*. Jurnal EDUCHILD. Vol.01. (1)
- Uthman, Miftah Adebayo Olowokofayoku. (1988). *K.H. Abdul Wahid Hasyim 1914-1953. His Educational And religious Thought*. Thesis from IAIN Sunan Kalijaga.
- M. Muhsin.Ms. (1993). *A.Wahid Hasyim dan Pendidikan Agama. Kajian Historis*. Penelitian IAIN Sunan Kalijogo.
- Zaini, Achmad. (1998). *Kyai Abdul Wahid Hasyim: His Contribusion to Muslim Reform and Indonesian Nationalism during Twenty Century*. Disertasi Montreal Canada: Institut for Islamic Studies (US) McGill University.
- Sofyan. (1985). *K.H. Abdul Wahid Hasyim Perjuangan dan Pemikirannya*. Penelitian IAIN Sunan Kalijogo.

D. Internet

- https://id.wikipedia.org/wiki/Teori_modernisasi, di akses 06 Agustus 2016.
- <http://www.ar.itb.ac.id/wdp/> diakses pada tanggal 11 Desember 2016.
- <http://www.gontor.ac.id/k-h-imam-zarkasyi>, diakses pada 12 Agustus 2016.
- Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1950, yang bersumber dari http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/pp_34_50.pdf. Di akses pada September 2017.
- <http://www.nu.or.id/post/read/17546/mencari-ilmu-demi-menggapai-ridho-allah>, diakses pada 01 Maret 2018. Pukul 20.00 Wib.
- <http://www.nu.or.id/post/read/38391/memadukan-ilmu-dan-amal>, di akses pada 1 maret 2018, pukul 20.05 Wib.
- <http://www.nu.or.id/post/read/85088/amanat-dan-sikap-adil>. diakses pada 8 Agustus 2018.
- <http://jurnalpai.uinsby.ac.id/index.php/jurnalpai/article/view/91>, di akses 22 Maret 2018
- <http://www.uinjkt.ac.id/id/prof-dr-azyumardi-azra-ma-cetak-ulama-kemenag-harus-dirikan-pesantren-tinggi-di-kampus/>, diakses pada 13 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Aboebakar_Atjeh. diakses pada 13 Agustus 2018.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan>, diakses pada 13 Maret 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Konferensi_Meja_Bundar. Di akses pada 8 Agustus 2017.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi>., diakses pada 10 Maret 2018.

<https://kbbi.web.id/rencana>. Di akses pada 08 Maret 2018.

<https://ms.wikipedia.org/wiki/Intelektual>, diakses pada 13 Maret 2018.

<https://tirto.id/sejarah-iii-dan-iii-hingga-hasrat-mewujudkan-iii-cDvs>, di akses pada 19 April 2018

<https://kbbi.web.id/strategi>., di akses pada tanggal 08 Maret 2018, Pukul 17.51 Wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Joko_Tingkir. Diakses pada 6 Desember 2018.

http://joko-tingkir.karya-ilmiah.web.id/id3/2360-2248/Joko-Tingkir_41484_joko-tingkir-karya-ilmiah.html. diakses pada 6 Desember 2018.

<http://ensiklo.com/2015/08/25/memahami-teori-interaksi-sosial/>. diakses pada 15 Desember 2018.

Nasar, M. Fuad. Kementerian Agama RI: Meng-agamakan Bangsa agar tetap Beragama.<https://jejakislam.net/sejarah-kementerian-agama-ri-meng-agama-kan-bangsa-agar-tetap-beragama/>, diakses pada 9 Juli 2018.

<http://digilib.unila.ac.id/15564/16/BAB%20II.pdf>. Hal. 16-25. diakses pada 15 Desember 2018.

<http://www.nu.or.id/post/read/95995/snouck-hurgronje-dan-sebutan-santri>. Diakses pada 12 Januari 2019.

<https://tirto.id/siasat-snouck-hurgronje-menjinakkan-islam-politik>-.Diakses pada 12 Januari 2019.

<https://alif.id/read/ali-makhrus/kh-a-wahid-hasyim-inisiator-integrasi-agama-sains-di-indonesia-b212367p/>. diakses pada 7 Januari 2019.

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/mkn/sutan-syahrir-si-kancil-dan-partai-sosialis-indonesia/>. Diakses pada 10 Januari 2019.

<http://jejakislam.net/faqih-usman-dan-kemunduran-umat-islam/>. Diakses pada 12 Januari 2019.

<https://tirto.id/hasjim-asy039ari-hadratussyaikh-islam-nusantara-DoV>. Diakses Pada 12 Januari 2019

<https://kbbi.web.id/kompromi>. Diakses pada 13 Januari 2019.

<https://kamuslengkap.com/kamus/politik/arti-kata/kompromi-politik>. Diakses pada 13 Januari 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kompromi>. Diakses pada 13 Januari 2019.

PP No. 34 Tahun 1950.

E. Wawancara

Wawancara dengan Dr. K.H. Salahuddin Wahid (Gus Solah) selaku Putra K.H. Abdul Wahid Hasyim di “*Ndalem*” Pondok Pesantren Jombang Jawa Timur.

Wawancara dengan Prof M. Sirozi, Ph.d. (Ahli Kajian Politik Pendidikan) Di Ruang Rektor UIN Raden Fatah Palembang.

Wawancara dengan Ust. Zainul Arifin (Kepala Perpustakaan K.H. Abdul Wahid Hasyim di Pondok Pesantren Jombang Jawa Timur).

Wawancara dengan Bapak. Nur Indra (Biro HDI Kemenag RI) di Kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta.

Wawancara dengan Ibu Hariyah, Kepala Bagian Perpustakaan Litbang Kementerian Agama RI Jakarta.

Wawancara dengan Bapak. Rasyid (Bagian Data Keagamaan) di Kantor Kementerian Agama Pusat Jakarta.

Wawancara dengan Bapak Ajis, (Petugas lama di pengarsipan Kementarian Agama pusat Jakarta).

Wawancara dengan Ibu Siska beliau adalah Kepala Bagian Biro Hukum Perundang-undangan Kementerian Agama RI Jakarta.

Wawancara dengan Ahmad Fauzan (Direktur Pustaka Tebu Ireng) di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang.

Wawancara dengan Ibu Yeri (Kepala Bagian Buku-Buku Lama) di Perpustakaan Nasional RI Jakarta.

Wawancara dengan H. Syatiri (Kepala Perpustakaan PBNU Jakarta).

